

SKRIPSI

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI
INFORMASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP IMPLEMENTASI
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**



Oleh :

MONIKA KARTIKA DEWI

NPM. 150412048

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI
INFORMASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP IMPLEMENTASI
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

disusun dan diajukan oleh :

**MONIKA KARTIKA DEWI
150412048**

telah diperiksa dan disetujui
oleh komisi pembimbing

Teluk Kuantan, 09 Maret 2022

Pembimbing I



Diskhamarzeweny, SE., MM
NIDN. 1012038701

Pembimbing II



Yul Emri Yulis, SE.M., Si
NIDN. 1014038901

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Rina Andriani, SE., M.Si
NIDN. 1003058501

LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN
BUDAYA ORGANISASI TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(OPD) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Disusun dan diajukan oleh:

MONIKA KARTIKA DEWI
150412048

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal , 09 Maret 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

NO.	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1	M. Irwan, SE.,MM	Ketua	1. 
2	Yul Emri Yulis, SE.,M. Si	Sekretaris	2. 
3	Diskhamarzeweny, SE.,MM	Anggota 1	3. 
4	Zul Amar,SE., ME	Anggota 2	4. 
5	Rina Andriani, SE.,M.Si	Anggota 3	5. 

Mengetahui,

Dekan
Falkutas Ilmu Sosial



Rika Ramadanti, S.IP., M.Si
NIDN.1030058402

Ketua
Program Studi Akuntansi



Rina Andriani, SE.,M.Si
NIDN. 1003058501

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertnda tangan dibawah ini:

Nama : Monika Kartika Dewi
NPM : 150412048
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI
INFORMASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP IMPLEMENTASI
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang penegetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akedemik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutipdalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktika terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Teluk Kuantan, 09 Maret 2022
Yang Membuat pernyataan

Monika Kartika Dewi
NPM. 150412048

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan atas kehadiran Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Pengaruh Kualita Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Implentasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi**. Ini dapat diselesaikan. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis dan diajukan dengan masudnuntuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar sarjan di Progaram Akuntansi Fakultas Ilmu sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Teluk kuantan. Dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran yang membangun bagi membaca untuk kesempurnaan skripsi ini, baik dari segi materi maupun penulisannya.

Penulis skripsi ini juga tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa doa, bimbingan, pengarahan, bantuan, kerjasama semua pihak yang turun membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Oleh karna itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Ibu **Rika Ramadahanti, S.IP.,M.,Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Ibu **Rina Andriani,SE.,M.Si** selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
4. Ibu **Diskhamarzeweny, SE., MM** selaku dosen pembimbing I dan sekaligus penasehat akademis yang telah bayak membantu dan meluangkan waktu dan pemecakan masalah serta meluangkan waktu kepada penulis dalam menyusun skripsi.

5. Bapak **Yul Emri Yulis, SE., M.Si** selaku dosen Pembimbing II yang telah bimbingan dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen selaku Staff Pengajar yang telah mendidik penulis selama perkuliahan , karyawan Serta Karyawati Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Terima kasih atas bantuannya.
7. Kedua Orang tua, keluarga dan teman atas do'a, motivasi, dan perhatiannya yang senantiasa tercurah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam bidang pendidikan dan diharapkan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Teluk Kuantan,09 Maret 2022
Penulis

Monika Kartika Dewi
NPM. 150412048

ABSTRAK

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Monika Kartika Dewi
Diskhamarzeweny
Yul Emri Yulis

penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Kabupaten Kuantan Singingi. Data penelitian in diperoleh dari data kuesioner (Primer). Populasi dalam penelian ini yaitu 234 seluruh pegawai di bagian keuangan atau akuntansi pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi. Pengambilan sampel *purposive sampling* di peroleh 52 sampel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis Regresi linier berganda, dengan uji t dan koefisien determinasi (R^2).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi standar akuntansi berbasis akruaL dimana t hitung $2,500 > t$ tabel $2,011$ dan nilai signifikan $0,016 < 0,05$. Kedua teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi standar akuntansi berbasis akruaL dimana t hitung $3,251 > t$ tabel $(2,011)$ dan nilai signifikan $0,002 < 0,05$. Ketiga Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi standar akuntansi berbasis akruaL dimana t hitung $2,774 > t$ tabel $2,011$ dan nilai hitung $0,006 < 0,05$. Diperoleh Koefiensi Determinasi sebesar Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Budaya Organisasi dapat menjelaskan variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL di Pemerintah Daerah sebesar 15,6%. Sedangkan sisanya 85,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak teramati dalam model penelitian ini.

Kata Kunci: Kualitas Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Budaya Organisasi Dan Implementasi SAP Berbasis AkruaL

ABSTRACT

THE EFFECT OF QUALITY OF HUMAN RESOURCES, INFORMATION TECHNOLOGY AND ORGANIZATIONAL CULTURE ON THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS BASED ON ACCRUAL BASED ON REGIONAL DEVICE ORGANIZATIONS (OPD) KUANTAN SINGINGI DISTRICT

Monika Kartika Dewi

Diskhamarzeweny

Yul Emri Yulis

This study aims to examine the influence of the quality of human resources, information technology and organizational culture on the implementation of accrual-based government accounting standards in the local government organization (OPD) of Kuantan Singingi Regency. The research data was obtained from questionnaire data (Primary). The population in this study were 234 all employees in the finance or accounting department at the OPD Kuantan Singingi Regency. Purposive sampling obtained 52 samples. This study uses a quantitative approach. The analysis used is multiple linear regression analysis, with t test and coefficient of determination (R²).

The results of this study indicate that firstly, human resources have a positive and significant effect on the implementation of accrual-based accounting standards where t count $2,500 > t$ table $2,011$ and a significant value of $0.016 < 0.05$. Both information technologies have a positive and significant impact on the implementation of accrual-based accounting standards where t count $3.251 > t$ table (2.011) and the significant value is $0.002 < 0.05$. Third, organizational culture has a positive and significant effect on the implementation of accrual-based accounting standards where t count is $2.774 > t$ table is 2.011 and the arithmetic value is $0.006 < 0.05$. A Coefficient of Determination was obtained. This indicates that the variables of Human Resources, Information Technology and Organizational Culture can explain the variable of Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards in Local Governments of 15.6%. While the remaining 85.4% is influenced by variables that are not observed in this research model.

Keywords: *Quality of Human Resources, Information Technology, Organizational Culture and Accrual-Based SAP Implementation*

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Pemerintah Daerah.....	11
2.1.2 Akuntansi Pemerintah.....	12
2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah	13
2.1.4 Basis Akuntansi Akrual	15
2.1.5 Perbedaan PP No. 24 Tahun 2005 dengan PP No. 71 Tahun 2010	17
2.1.6 Peraturan Menteri Perdagangan No. 68 Tahun 2013	21
2.1.7 Implementasi SAP Berbasis Akrual	26
2.1.8 Sumber Daya Manusia	28
2.1.9 Teknologi Informasi	30

2.1.10	Budaya Organisasi	32
2.2	Penelitian Terdahulu.....	33
2.3	Pengembangan Hipotesis.....	36
2.3.1	Pengaruh Kualitas sumber daya terhadap implementasi standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi.....	36
2.3.2	Pengaruh teknologi informasi terhadap implementasi standar akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi.....	37
2.3.3	Pengaruh Budaya organisasi terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi	39
2.3.4	Kerangka Pemikiran	40
BAB III METODE PENELITIAN		41
3.1	Rancangan Penelitian	41
3.2	Tempat dan Waktu penelitian.....	41
3.2.1	Tempat Penelitian.....	41
3.2.2	Waktu Penelitian.....	42
3.3	Populasi dan Sampel	43
3.3.1	Populasi	43
3.3.2	Sampel	45
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	47
3.4.1	Jenis Data	47
3.4.2	Sumber Data	48
3.5	Teknik Pengumpulan Data	48
3.6	Instrumen Penelitian.....	48
3.7	Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional	50
3.7.1	Variabel Penelitian	50
3.7.2	Definisi Operasional	54
3.8.2	Metode Analisis Data.....	57
3.8.2.1	Statistik Deskriptif	57

3.8.2.2 Uji Reliabilitas	57
3.8.3 Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas	58
3.8.3.1 Uji Normalitas	58
3.8.3.2 Uji Multikolinearitas	59
3.8.3.3 Uji Multikolinearitas	59
3.8.4 Uji Autokorelasi.....	59
3.8.5 Uji Hipotesis.....	60
3.8.5.1 Uji t (Secara Parsial)	61
3.8.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
4.1.1 Letak Geografis	62
4.1.2 Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi	63
4.1.3 Visi Dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi	64
4.1.3.1 Visi Kabupaten Kuantan Singingi	64
4.1.3.2 Misi Kabupaten Kuantan Singingi	65
4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	66
4.2 Deskripsi Data	69
4.3 Karakteristik Responden.....	70
4.3.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	70
4.3.2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	71
4.3.3 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	71
4.3.4 Profil Responden Berdasarkan Masa kerja.....	72
4.4 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	73
4.4.1 Sumber Daya Manusia (X_1)	73
4.4.2 Teknologi Informasi (X_2)	77
4.4.3 Variabel Budaya Organisasi (X_3)	80

4.4.4	Variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Y)	84
4.5	Hasil Uji Kualitas Data	88
4.5.1	Hasil Uji Validitas	88
4.5.2	Hasil Uji Reabilitas	91
4.6	Hasil Uji Asumsi Klasik	92
4.6.1	Hasil Uji Normalitas	92
4.6.2	Hasil Uji Multikolonieritas	94
4.6.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	94
4.6.4	Hasil Uji Autokorelasi	96
4.7	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	97
4.8	Pengujian Hipotesis	99
4.9	Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	101
4.10	Pembahasan Hasil Penelitian	102
4.10.1	Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual di Daerah	102
4.10.2	Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual di Daerah	103
4.10.3	Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual di Daerah	105
BAB V PENUTUP		106
5.1	Kesimpulan	106
5.2	Saran	107
Daftar Pustaka		109

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan Akuntansi Kas dan Akuntansi AkruaI	16
Tabel 2.2 Komponen Laporan Keuangan	18
Tabel 2.3 Perbedaan Komponen Laporan Keuangan.....	19
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	42
Tabel 3.3 Daftar Nama Dinas dan Badan yang Terdapat di Kabupaaten Kuantan Singingi dan Populasi yang Dijadikan Sampel	43
Tabel 3.4 Daftar Nama Dinas dan Badan yang Terdapat di Kabupaaten Kuantan Singingi dan Populasi yang Dijadikan Sampel	45
Tabel 3.5 Defenisi Operasional Variabel.....	55
Tabel 4.1 Rincian Penyebaran Kuesioner.....	69
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	70
Tabel 4.3 Karateristik Responden Berdasarkan Umur	71
Tabel 4.4 Karateristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	72
Tabel 4.5 Karateristik responden Berdasarkan Masa kerja.....	72
Tabel 4.6 Tanggapan Responden Terhadap Sumber Daya Manusia (X_1)	74
Tabel 4.7 Tanggapan Respoden Terhadap Teknologi Informasi(X_2)	78
Tabel 4.8 Tanggapan RespondenBudaya Organisasi (X_3)	81
Tabel 4.9Tanggapan Responden Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Y).....	85
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Sumber Daya Manusia	89
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Data	92
Tabel 4.12Hasil Uji Multikolinieritas	94
Tabel 4.13 Hasil Uji Glesjer	96
Tabel 4.14 Hasil Uji Autokorelasi	97

Tabel 4.15 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	97
Tabel 4.16 Hasil Uji Parsial (Uji t)	99
Tabel 4.17 Hasil Pengujian Hipotesis pertama	99
Tabel 4.18 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua	100
Tabel 4.19 Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga	101
Tabel 4.20 Hasil Analisis Koefisien Determinasi	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	40
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas	93
Gambar 4.2 Grafik Histogram	93
Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang keuangan, terutama di bidang akuntansi. Isu yang sangat penting di pemerintahan Indonesia saat ini adalah tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara agar dijalankan secara akuntabel dan transparan, terkait dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Indonesia. Sehingga perubahan terhadap pengelolaan keuangan negara masih terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk semakin mewujudkan amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.

Sesuai dengan amanat dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa isi laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara. Pemerintah melakukan usaha berkelanjutan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual. Sesuai dengan amanat dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran pendapatan

dan belanja berbasis kas. Dan selambat-lambatnya ketentuan berbasis akrual tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa akuntansi lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Laporan keuangan berbasis akrual menyediakan informasi mengenai kegiatan-kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektifitas serta ketaatan terhadap peraturan.

Perbedaan utama antara Basis Kas Menuju Akrual Basis Akrual adalah pada basis pengakuan pendapatan dan biaya. Pengukuran pendapatan dan biaya pada basis kas dilakukan berdasarkan masuk dan keluarnya kas, sedangkan basis akrual berdasarkan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

Perubahan basis dalam Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan mampu memberikan gambaran utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah secara keseluruhan. Maka dengan sistem dan proses berbasis akrual dalam akuntansi pemerintahan dapat mendukung terwujudnya *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (*cost*) pemerintah dan

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan didalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas. Tujuan umumnya adalah untuk meminta pertanggungjawaban para manajer dari sisi keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) dan pada saat yang sama melonggarkan control atas masukan (*input*). Dalam konteks ini, para manajer diminta agar bertanggungjawab untuk seluruh biaya yang berhubungan dengan *output/outcome* yang dihasilkannya, tidak sekedar dari sisi pengeluaran kas (Mulyana, 2015 : 34).

Sebagai sebuah konsekuensi logis dari amanat yang dicantumkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Menteri Dalam Negeri sebagai barisan paling depan dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Dalam permendagri ini diamanatkan diantaranya peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi dimaksud adalah kebijakan akuntansi pelaporan keuangan yang memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian laporan keuangan. Dan kebijakan akuntansi yang mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan peristiwa sesuai dengan PSAP untuk pemilihan metode akuntansi dalam kebijakan SAP.

Selanjutnya juga dijelaskan peraturan kepala daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SPAD) yang meliputi sistem akuntansi PPKD dan sistem akuntansi SPKD, SPAD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam

buku besar, penyusunan neraca saldo dan penyajian laporan keuangan. Penerapan SAP berbasis akrual memerlukan upaya keras pemerintah karena jumlah jenis laporan yang bertambah banyak.

Dengan standar baru ini, laporan keuangan yang harus disiapkan pemerintah bertambah menjadi tujuh jenis dari basis sebelumnya yang hanya empat jenis. Ketujuh jenis laporan itu meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Terbitnya Permendagri No. 64 Tahun 2013 tersebut memperjelas model akuntansi berbasis akrual yang akan diterapkan. Pemerintah daerah wajib menerapkan SAP berbasis Akrual paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Melihat kondisi Indonesia yang terdiri dari 491 daerah provinsi dan kabupaten/kota, tentu akan lebih sulit penerapannya dibanding di pusat. Bagaimanapun juga di kabupaten Kuantan Singingi harus menetapkan SAP berbasis akrual pada setiap OPD yang ada dan tentu saja membutuhkan penyesuaian. Hal ini menunjukkan perlunya Pemerintah Daerah mempersiapkan penerapan SAP berbasis akrual dengan serius agar kualitas laporan keuangan dapat terjaga dan mampu menjadi contoh bagi Kabupaten/Kota lainnya.

Apabila tidak dipersiapkan dengan baik, perubahan standar akuntansi ini dapat memengaruhi capaian kualitas pertanggungjawaban APBN/APBD. Pada tahun 2015, BPK melakukan pemeriksaan kinerja untuk menilai kesiapan pemerintah daerah. Pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan yang terkait dengan kebijakan, teknologi

informasi dan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaporan keuangan berbasis akrual. (Pendapat BPK, 2015). Dalam hal implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual ditemukan beberapa kendala dalam penerapannya, antara lain:

1. Pemda belum memiliki dokumen perencanaan strategis yang komprehensif untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual, Pemda berpotensi mengalami kesulitan dalam penyajian kembali laporan keuangan tahun sebelumnya (restatement) di awal penerapan SAP berbasis akrual
2. Sumber Daya Manusia pemerintah daerah untuk mendukung implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual belum memenuhi syarat kompetensi.
3. Perangkat regulasi dan sistem aplikasi yang digunakan pemerintah daerah dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual belum selaras. Penempatan Sumber Daya Manusia pengelola keuangan, aset, dan Teknologi Informasi yang tidak sesuai bidangnya.
4. Pelatihan atau sosialisasi Sumber Daya Manusia terkait implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual belum memadai, Sistem aplikasi yang digunakan pemerintah daerah belum sesuai kebutuhan.
5. Pengendalian atas sistem aplikasi masih lemah.

Dari kendala-kendala tersebut, BPK menghimbau Pemerintah daerah agar menyusun roadmap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, dan menyiapkan langkah-langkah taktis dalam aspek regulasi, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi.

Faktor lain yang tidak kalah penting dalam keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah Budaya Organisasi yang ada dalam pemerintah daerah. Menurut (Wibowo, 2011 : 19), Budaya Organisasi adalah filosofi dasar organisasi yang memuat keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai bersama yang menjadi karakteristik inti tentang bagaimana melakukan sesuatu dalam organisasi. Keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai tersebut menjadi pegangan semua sumber daya manusia dalam organisasi dalam melaksanakan kinerjanya.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual. SDM yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi SDM yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan. Selain Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya Organisasi, ada faktor lain yang menentukan kesuksesan penerapan basis akrual yaitu Teknologi Informasi. Menurut (Binsar, 2010) adanya kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan memerlukan sistem informasi akuntansi dan *IT based system* yang lebih rumit.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah memiliki Teknologi Informasi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi memiliki tiga aplikasi, salah satunya adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Aplikasi ini hanya sebagai alat bantu mempermudah pengelolaan keuangan, didalamnya terdapat beberapa modul seperti, Modul Penganggaran, Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Modul Pertanggung jawaban.

Aplikasi lainnya adalah Aplikasi Gaji yang diberikan secara gratis oleh PT. Taspen kepada seluruh Pemerintah Daerah. Ini merupakan salah satu bentuk

kepedulian Taspen kepada Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah. Dan aplikasi yang ketiga adalah Aplikasi Aset yang sedang dalam tahap pengembangan. Keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Untuk mencapainya diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan penerapan. Maka, perlu dilakukan suatu penelitian yang menganalisis faktor tersebut untuk menentukan seberapa besar tingkat pengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Fokus kajian penelitian ini adalah bagaimana variabel kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan teknologi informasi mempengaruhi penerapan Pemerintah Daerah dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual. Penelitian yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAP berbasis akrual telah banyak dilakukan.

Perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu masih bersifat persiapan dan diteliti sebelum Pemerintah Daerah wajib menerapkan SAP berbasis akrual yaitu pada tahun 2018, sedangkan penelitian ini dilakukan pada saat SAP berbasis akrual di Pemerintah Daerah sudah dijalankan. Dan karena terdapat perbedaan hasil dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan melihat pentingnya persiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu masih ada beberapa kendala yang menyebabkan sulitnya penerapan dari pencatatan berbasis kas menuju penerapan berbasis akrual.

Untuk mencapainya diperlukan faktor-faktor pendukung yang telah disebutkan sebelumnya yang dapat mempengaruhi kesuksesan penerapan. Maka, perlu dilakukan suatu penelitian yang menganalisis faktor tersebut untuk menentukan seberapa besar tingkat pengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual di Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Budaya Organisasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.6 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam dalam latar belakang yang merujuk pada penelitian sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi?

1.7 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi.

1.8 Manfaat Penelitian

1.8.1 Manfaat Teoritis

Hasil akan mempunyai kontribusi untuk memberikan bahan pertimbangan terhadap penerapan Standar Kuntansi Pemerintah berbasis akruaI sehingga dapan menerapkan basis akruaI secara maksimal. Penelitian ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berbasis akruaI dengan meninjau kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penerapannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan utnuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan Pemerintah Daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengambil kebijakan-kebijakan tentang cara yang terbaik dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta wawasan mengenai Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

4. Bagi Masyarakat

Hasil riset akan memiliki kontribusi kebijakan mendukung Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 dan kebijakan-kebijakan lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang akan dipertimbangkan setelah melihat hasil riset yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.4 Landasan Teori

2.4.1 Pemerintah Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diatur oleh undang-undang, baik daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota. Dalam suatu wilayah pemerintah daerah yaitu melibatkan DPRD, Perangkat Daerah terdiri atas sekretariat daerah, Dinas Daerah, Lembaga Daerah, Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai dengan kebutuhan daerah (Mardiasmo, 2018 : 99).

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 menandakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai kewajiban untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Hal ini sesuai dengan pasal 32 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP berbasis akrual.

2.4.2 Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Yang disebut keuangan daerah adalah semua kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Nunuy, 2010 : 4).

Akuntansi pemerintah merupakan suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut (Bachtiar Arif dkk, 2002 :3).

Sedangkan menurut (Abdul Halim, 2002 : 143) Akuntansi Pemerintah adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif atau tindakan. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagaimana lembaga mikro.

Akuntansi Pemerintah adalah aplikasi akuntansi dibidang keuangan negara (*public finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintah.

2.4.3 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan (Mardiasmo, 2018 : 54). Menurut (Mahsun, 2013) standar akuntansi keuangan sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Pemerintah Indonesia telah menetapkan standar akuntansi pemerintahan yang disebut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun SAP dengan mengacu pada praktek-praktek terbaik internasional, diantaranya dengan mengadaptasi *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS). KSAP bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri keuangan dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada menteri keuangan. Tugas KSAP mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik maka penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah harus mengikuti standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Penyusunan dan penghasilan laporan keuangan pemerintah yang baik dan benar, yaitu memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan presiden dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut perundang-undangan satuan organisasi yang dimaksudkan wajib menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. SAP dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor.

2.4.4 Basis Akuntansi Akrua

Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan (Nunuy, 2010 :22).Basis akrual seperti yang sudah disimpulkan oleh KSAP dalam Epiane (2015) adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa akuntansi lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Laporan keuangan berbasis akrual menyediakan informasi mengenai kegiatan-kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektifitas serta ketaatan terhadap peraturan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah dalam kerangka konseptual Paragraf 42 basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Basis akrual digunakan untuk Laporan Operasional (LO) dan Neraca. Sedangkan untuk Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) disusun dan dilaksanakan berbasis kas. Bila anggaran disusun berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Perbedaan mendasar dari basis akrual dengan basis kas ialah terletak pada konsep pengakuan belanja dan pendapatan pada suatu periode.

Tabel 2.1
Perbedaan Akuntansi Kas dan Akuntansi Akrual

Indikator	Akuntansi Berbasis Kas	Akuntansi Berbasis Akrual
Pelaksanaan	Relatif mudah dan sederhana	Relatif rumit
Hubungan dengan sistem anggaran tradisional	Relatif kuat	Relatif lemah
Ruang Lingkup	Hanya mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas	Mencatat seluruh transaksi, baik kas maupun non kas
Waktu pencatatan	Hanya mencatat transaksi yang terjadi dalam satu periode akuntansi	Mencatat estimasi dampak dari transaksi sekarang dan perubahan kebijakan
Audit dan control	Relatif sederhana	Relatif lebih rumit

Sumber: Paul Boothe et, al dalam Damayanti, 2012.

Akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting*) digunakan untuk mencatat pendapatan (*revenue*) ketika diperoleh (*earned*) dan biaya (*expense*) pada saat terjadi (*incurred*), tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan (Mardiasmo, 2018 : 46). Akuntansi berbasis akrual dianggap lebih baik dari pada akuntansi berbasis kas.

Pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan *cost of service* dan *charging of service*, yaitu untuk

mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.

(Nunuy, 2010 : 22) Alasan-alasan penggunaan basis akrual diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup misal transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang utang dan piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
2. Hanya akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya (*full cost of operation*), misalnya keputusan apakah suatu pekerjaan harus dikontrakkan atau dilakukan secara sewa kelola.
3. Hanya akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.
4. Hanya akuntansi berbasis akrual yang menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif tentang pemerintah, misalnya penghapusan utang yang tidak ada pengaruhnya di laporan berbasis kas.

2.4.5 Perbedaan PP No. 24 Tahun 2005 dengan PP No. 71 Tahun 2010

Perbedaan antara PP No. 24 Tahun 2005 dengan PP No. 71 Tahun 2010, utamanya terkait dengan komponen laporan keuangan, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Komponen Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (Basis Kas menuju Akrual)	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Basis Akrual)
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Neraca Laporan Arus Kas Laporan Operasional (LO) Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan

Sumber: Hariyanto, 2012.

Tabel 2.3
Perbedaan Komponen Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (Basis Kas menuju Akrual)	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Basis Akrual)
LAPORAN PERUBAHAN SAL Tidak ada laporan tersendiri	LAPORAN PERUBAHAN SAL Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih awal; Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan Lain-lain; Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Lanjutan tabel 2.3

<p>NERACA</p> <p>Ekuitas Dana terbagi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekuitas Dana Lancar: selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran/saldo anggaran lebih • Ekuitas Dana Investasi: mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang • Ekuitas Dana Cadangan: mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan 	<p>NERACA</p> <p>Hanya Ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.</p> <p>Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas</p>
<p>LAPORAN ARUS KAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Par 15) • Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran 	<p>LAPORAN ARUS KAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (Par 15) • Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris

Lanjutan tabel 2.3

LAPORAN REALISASI ANGGARAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN
<p>Bersifat optional</p> <p>Disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual</p> <p>Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos :</p> <p>a) Pendapatan dari kegiatan operasional;</p> <p>b) Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi;</p> <p>c) Surplus atau defisit.</p>	<p>Bersifat optional</p> <p>Disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual</p> <p>Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos :</p> <p>a) Pendapatan dari kegiatan operasional;</p> <p>b) Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi;</p> <p>c) Surplus atau defisit.</p>
<p>LAPORAN OPERASIONAL</p> <p>Tidak ada laporan tersendiri</p>	<p>LAPORAN OPERASIONAL</p> <p>Merupakan Laporan Keuangan Pokok</p> <p>Menyajikan pos-pos sebagai berikut:</p> <p>a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;</p> <p>b) Beban dari kegiatan operasional ;</p> <p>c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;</p> <p>d) Pos luar biasa, bila ada;</p> <p>e) Surplus/defisit-LO.</p>

Lanjutan tabel 2.3

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
<p>Bersifat optional</p> <p>Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran; b) Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standa lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas; c) Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah. 	<p>Merupakan Laporan Keuangan Pokok</p> <p>Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ekuitas awal; b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. d) Ekuitas akhir.
<p>CALK</p> <p>Pada dasarnya hampir sama dengan PP baru</p>	<p>CALK</p> <p>Perbedaan yang muncul hanya dikarenakan komponen laporan keuangan yang berbeda dengan PP lama.</p>

Sumber: Epiane, 2015.

2.4.6 Peraturan Menteri Perdagangan No. 68 Tahun 2013

Pada tanggal 3 Desember 2013, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Terbitnya peraturan menteri dalam negeri tersebut merupakan tindak lanjut dari pasal 7 ayat 3 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

Peraturan menteri dalam negeri tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD), termasuk Bagan Akun Standar (BAS), yang selanjutnya ditetapkan dalam suatu peraturan kepala daerah. Sesuai pasal 10 ayat 1 permendagri tersebut, peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan SAPD tersebut harus sudah ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Mei 2014. Sesuai PP Nomor 71 tahun 2010, penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah harus dilaksanakan mulai tahun anggaran 2015. Jadi, masih ada waktu setahun lagi untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum SAP berbasis akrual benar-benar diterapkan pada awal tahun anggaran 2015.

Terbitnya Permendagri 64 Tahun 2013 tersebut semakin memperjelas model akuntansi berbasis akrual yang akan diterapkan nantinya terutama kalau kita pelajari Lampiran II (Panduan Penyusunan SAPD) dan Lampiran III (Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah yang ditetapkan hingga 5 digit (rincian obyek)). Beberapa hal yang dapat kami simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Rancangan SAPD berbasis akrual yang akan diterapkan masih sama dengan Cash Toward Accrual (CTA) yaitu terdiri dari SAPD pada OPD sebagai entitas akuntansi dan SAPD pada SKPKD sebagai entitas pelaporan. Transaksi-transaksi yang melibatkan kedua sistem dijumpai oleh dua akun berikut: Aset Untuk Dikonsolidasikan OPD (akun untuk klasifikasi Aset Lancar) dan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan-RK PPKD (akun untuk OPD dengan klasifikasi Ekuitas). Klasifikasi RK PPKD pada akuntansi akrual tersebut berbeda dengan klasifikasi pada akuntansi berbasis CTA, dimana RK PPKD diklasifikasikan pada kewajiban jangka

pendek. Transaksi-transaksi yang melibatkan kedua sistem yang menggunakan akun OPD dan RK PPKD hanya diterapkan pada transaksi-transaksi yang berkaitan dengan Laporan Operasional (LO), misalnya penyetoran penerimaan PAD oleh bendahara penerimaan ke kas daerah, pengakuan akun beban yang menggunakan mekanisme LS, pengajuan uang persediaan, ganti uang persediaan, dan tambahan uang persediaan. Akun RK OPD dan RK PPKD harus bersaldo sama ketika dilakukan konsolidasi laporan keuangan oleh PPKD selaku BUD. Sesuai SAP, akun-akun resiprokal tersebut dapat dilakukan eliminasi atau tidak perlu dieliminasi.

2. Adanya akuntansi anggaran: Estimasi Pendapatan (debit), Estimasi Penerimaan Pembiayaan (debit), Apropriasi Belanja (kredit), dan Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan (kredit). Pencatatan akuntansi anggaran dilaksanakan ketika DPA OPD dan DPA SKPKD disahkan oleh PPKF dan disetujui oleh sekretaris daerah. Selisih akun estimasi dan apropriasi di catat dalam akun Estimasi Perubahan SAL. Akun Estimasi Perubahan SAL diklasifikasikan sebagai Ekuitas SAL. Ketika akhir tahun akun-akun anggaran dikosongkan dengan cara membuat ayat jurnal penutup.
3. Akun ekuitas tidak lagi terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan, namun diklasifikasikan sebagai: Ekuitas, Ekuitas SAL, dan Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan.
4. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Pendapatan LRA, Belanja, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan, ketika diakui selalu dilawankan dengan akun

Estimasi perubahan SAL (db Estimasi Perubahan SAL, kr Pendapatan LRA/Penerimaan Pembiayaan dan Belanja/Pengeluaran Pembiayaan, kr Estimasi Perubahan SAL). Pada akhir tahun, akun-akun LRA akan dikosongkan dengan membuat ayat jurnal penutup: db Pendapatan LRA/Penerimaan Pembiayaan dan kr Belanja/Pengeluaran Pembiayaan, dimana selisihnya akan dicatat dalam akun Surplus/Defisit-LRA. Akun Surplus/Defisit-LRA diklasifikasikan dalam akun Ekuitas SAL. Selanjutnya akun Surplus/Defisit-LRA tersebut akan ditutup ke akun Estimasi Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi dalam tahun berjalan.

5. Berbeda dengan akuntansi berbasis CTA, pada akuntansi berbasis akrual akun Surplus/Defisit, Pembiayaan Netto, dan SILPA Tahun Berkenaan bukanlah sebuah akun. Ketiganya hanya merupakan perhitungan semata dalam format Laporan Realisasi Anggaran. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan Laporan Operasional (LO) berupa Pendapatan-LO dan Beban, pada akhir tahun akan ditutup ke akun Surplus/Defisit LO. Akun Surplus/Defisit LO adalah akun Ekuitas. Selanjutnya akun Surplus/Defisit LO tersebut akan ditutup ke akun Ekuitas.
6. Akun Surplus/Defisit LO dan akun Ekuitas sama-sama berada dalam jenis akun Ekuitas (Lihat Lampiran III Permendagri Nomor 64 Tahun 2013).
7. Laporan keuangan yang wajib dibuat oleh OPD (termasuk SKPKD selaku OPD) adalah: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan SKPKD selaku BUD wajib membuat laporan keuangan berupa Neraca, LRA, LO, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Laporan Konsolidasian, dan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan berupa Neraca, LRA, LO dihasilkan melalui pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi selama tahun berjalan melalui masing-masing akun-akun Neraca, LRA, dan LO. Sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL, dan Laporan Arus Kas dibuat berdasarkan informasi yang telah dihasilkan dari Neraca, LRA, dan LO.

8. Mengenai pengakuan pendapatan LRA, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 telah menetapkan bahwa Pendapatan LRA diakui ketika kas diterima di rekening kas umum daerah, diterima oleh OPD, atau oleh entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Khusus untuk pengakuan Pendapatan LRA ketika kas telah diterima oleh OPD melalui bendahara penerimaan, hal ini bertentangan dengan prinsip pengakuan Pendapatan LRA sesuai SAP (meskipun hal ini dibenarkan oleh IPSAP No 2). Sedangkan kriteria pengakuan Pendapatan LRA yang ketiga, meskipun tidak diberikan contohnya secara jelas dalam Lampiran I (Panduan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah) dan Lampiran II (Panduan Penyusunan SAPD), hal itu jelas terkait dengan pengakuan Pendapatan LRA oleh OPD yang berstatus BLUD. Dalam Bagan Akun Standar juga telah diakomodir akun Kas di BLUD dan akun Pendapatan BLUD-LRA dalam jenis akun Lain-lain PAD Yang Sah-LRA.
9. Untuk pengakuan belanja yang pembayarannya melalui bendahara pengeluaran, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 menetapkan bahwa pengakuan belanja tersebut dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh pengguna anggaran. Artinya, ketika SPM telah ditandatangani oleh pengguna anggaran, maka

PPK OPD harus mengakui belanja tersebut. Hal ini berbeda dengan ketentuan SAP mengenai pengakuan belanja yang pembayarannya melalui bendahara pengeluaran, yaitu diakui ketika telah mendapatkan pengesahan oleh unit yang memiliki fungsi sebagai perbendaharaan (BUD) dengan diterbitkannya SP2D GU dan SP2D Nihil (meski hal ini dibenarkan oleh IPSAP No. 2).

10. Pengakuan beban dalam akuntansi akrual tidak selalu berkaitan dengan dikeluarkannya kas. Ketika sudah timbul kewajiban, maka beban harus segera diakui. Sedangkan untuk pengakuan belanja dilakukan ketika sudah terdapat pengeluaran kas dari kas daerah atau pengesahan oleh BUD, meskipun dalam jurnal-jurnal transaksinya akun Pendapatan LRA dan akun Belanja tidak dilawankan dengan akun Kas di Kas Daerah (tetapi dengan akun Estimasi Perubahan SAL). Oleh karenanya, perlu dipahami bahwa pencatatan beban dan belanja bisa berbeda waktunya.

2.4.7 Implementasi SAP Berbasis Akrual

Beberapa negara telah mereformasi akuntansi sektor publik di lingkungan mereka, terutama perubahan dari *cash basis* menjadi *accrual basis*. New Zealand merupakan contoh negara yang sukses menerapkan sistem *accrual basis* sejak tahun 1991. Sistem yang diterapkan di negara ini telah mampu memberikan kontribusi yang besar dalam menghasilkan informasi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan sistem *cash basis* dalam hal kuantitas dan kualitasnya.

Tujuan pengenalan *Accrual Basis* ini adalah untuk memfasilitasi transparansi yang lebih besar pada organisasi pemerintah dan meningkatkan

efisiensi dan efektivitas. Sementara itu, beberapa negara Uni Eropa lainnya masih mengendalikan pengeluarannya dengan menggunakan *cash basis* (Mardiasmo, 2018 : 46), beberapa kasus menunjukkan bahwa reformasi kearah *accrual basis* ternyata tidak seluruhnya menjamin keberhasilan. Kasus yang terjadi di Italia menunjukkan bahwa pengenalan terhadap *Accrual Basis* memberikan kontribusi yang kurang signifikan terhadap transparansi, efisiensi, dan efektivitas organisasi publik di negara tersebut.

Perubahan dari *cash basis* menjadi *Accrual Basis* memang tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Perlu analisis yang mendalam dan kompleks terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor sosiologis masyarakat negara tersebut (Mardiasmo, 2018). Nazier (2009) menyatakan perubahan fundamental sistem pelaporan dan akuntansi dari *cash basis* menjadi *accrual basis* perlu dikelola dan dipersiapkan dengan baik. IFAC mensyaratkan agar proses transfer tersebut berjalan dengan lancar perlu persiapan memadai yang meliputi adanya mandat dari peraturan perundang-undangan yang jelas, komitmen politik, komitmen dari pemerintah pusat maupun daerah, SDM yang memadai, kemampuan teknologi dan sistem informasi yang memadai dan wewenang dalam melakukan perubahan yang didukung oleh legislative.

Kemudian menurut KSAP (2010) setelah syarat-syarat implementasi dipenuhi, pemerintah daerah dapat melaksanakan langkah-langkah penerapan basis akrual di pemerintah daerah. Pada tingkat daerah, strategi penerapan basis akrual dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan pelatihan yang berjenjang. Berjenjang yang dimaksud meliputi pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis,

dengan tujuan sosialisasi dan pelatihan sebagai berikut: meningkatkan skill pelaksana, membangun *awareness* dan mengajak keterlibatan semua pihak.

2. Menyiapkan dokumen legal yang bersifat lokal seperti peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem prosedur.
3. Melakukan uji coba sebagai tahapan sebelum melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh. Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi mereka serta adanya langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan basis akuntansi yang baru ini, diharapkan pemerintah kita siap mempratikan akuntansi berbasis akrual penuh secara benar dan professional.

2.4.8 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia atau *human resources* mengandung dua pengertian. Pertama, adalah “usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi”. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, “SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut”. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat (Sumarsono, 2003).

Manusia merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan/organisasi. Banyak defenisi yang dapat digunakan untuk

mendefinisikan sumber daya manusia. Menurut Nawawi dalam Aldiani (2010) yang dimaksudkan sebagai SDM adalah meliputi tiga pengertian yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan).
- b. Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
- c. Sumber Daya Manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material atau non financial) didalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah dalam Putri (Warisno, 2010).

Laporan keuangan wajib disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK..

Upaya lainnya bisa saja dengan memberikan pelatihan secara insentif agar praktek penerapan akuntansi berbasis akrual dapan dilakukan dengan lebih baik. Mungkin saja masih ada pihak internal yang belum terbiasa dengan sistem akuntansi berbasis akrual dan enggan melakukan perubahan, sehingga dibutuhkan dorongan dari organisasi profesi untuk memberikan peran pentingnya guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten di bidang

akuntansi pemerintahan agar komitmen pemerintah dapat dijalankan tentang kebijakan SAP berbasis akrual dengan baik.

Sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 dalam penerapannya penyusunan dan persiapannya memerlukan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi pemerintah. Untuk itu pemerintah membenahi kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan, apalagi pada saat sekarang ini dalam penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual. Salah satu upaya dalam membenahi kualitas sumber daya manusia adalah dengan memberikan insentif yang memadai guna mencegah timbulnya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) oleh SDM yang tingkat kualitasnya masih rendah

Tanggungjawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Untuk menilai tingkat kecukupan SDM dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kualitas dan kuantitas. Penilaian dari sisi kuantitas dikatakan cukup bila di dalam organisasi pembagian beban kerja kepada setiap individu telah tepat, dimana tidak ada kekurangan maupun kelebihan beban kerja. Analisis jabatan dilakukan dengan membandingkan beban kerja dengan jumlah pegawai. Sedangkan dari sisi kualitas dapat dilakukan dengan penilaian kualitas dari masing-masing individu (Epiane: 2015).

2.4.9 Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah istilah utama umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan dan mengkomunikasikan informasi Haryanto (2012). Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak (*software*), *data base*, jaringan (internet, intranet), *electronic commerce* dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi Indriasari (2008). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), adalah dibutuhkan teknologi informasi untuk membantu sistem akuntansi pemerintahan dimana serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengihktisan dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Untuk itu, agar dapat berjalan dengan lancar.

Menurut Aldiani (2010) perangkat pendukung yang memberikan sarana kepada penyusun laporan keuangan pemerintah daerah dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu:

1. Perangkat Keras

Perangkat keras (*hardware*) adalah perangkat yang berwujud fisik dan kasat mata. Terdiri dari *Central Processing Unit* (CPU), peralatan input, peralatan output dan kombinasi input-ouput. Menurut Mulyono dalam Aldiani (2010) perangkat keras adalah peralatan komputer yang dapat dilihat oleh mata atau diraba.

2. Perangkat Lunak

Perangkat lunak (*software*) meliputi perintah-perintah yang berisi program serta data yang melengkapi dan juga mempunyai tugas yang menghubungkan manusia dengan perangkat kerasnya Aldiani (2010).

Perangkat lunak dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Program komputer digunakan untuk memerintah komputer melaksanakan langkah-langkah yang tertulis di program.
- b. Dokumentasi adalah catatan-catatan yang digunakan untuk menjelaskan langkah atau prosedur program tersebut dan semua catatan yang berkaitan dengan proses data tersebut. Teknologi informasi memegang peranan cukup penting dalam suatu organisasi. Teknologi informasi ini diharapkan sebagai suatu sistem informasi yang dapat mendukung tercapainya keefektifan dan keefisienan organisasi.

2.4.10 Budaya Organisasi

Budaya adalah suatu pola asumsi dasar yang ditemukan dan dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu karena mempelajari dan menguasai masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal, yang telah bekerja dengan cukup baik untuk dipertimbangkan secara layak dan karena itu diajarkan pada anggota baru sebagai cara yang dipersepsikan, berpikir dan dirasakan dengan benar dalam hubungan dengan masalah tersebut (Wibowo, 2011 : 19).

Dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah tentu sangat diperlukan adanya budaya organisasi sebagaimana penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 di revisi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menegaskan bahwa titik berat pe

Menyatakan bahwa budaya terdiri dari mental program bersama yang mensyaratkan respons individual pada lingkungannya. Defenisi tersebut mengandung makna bahwa kita melihat budaya dalam perilaku sehari-hari, tetapi dikontrol oleh mental program yang ditanamkan sangat dalam. Budaya bukan hanya perilaku dipermukaan, tetapi sangat dalam menanamkan dalam diri kita masing-masing (Wibowo, 2011 : 370).

Budaya adalah penentu yang kuat dari keyakinan, sikap dan perilaku orang dan pengaruhnya dapat diukur melalui bagaimana orang termotivasi untuk merespons pada lingkungan budaya mereka. Dalam pandangan (Jeff Cartwright dalam Wibowo, 2011) Budaya sebagai sebuah kumpulan orang terorganisasi yang berbagi tujuan, keyakinan dan nilai-nilai yang sama dan dapat diukur dalam bentuk pengaruhnya pada motivasi.

Dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah filosofi dasar organisasi yang memuat keyakinan, norma-norma dan nilai-nilai bersama yang menjadi karakteristik inti tentang bagaimana cara melakukan sesuatu dalam organisasi. Keyakinan, norma-norma dan nilai-nilai tersebut menjadi pegangan semua sumber daya manusia dalam organisasi melaksanakan kinerjanya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitan terdahulu yang berhubungan tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

sudah pernah dikaji dalam beberapa skripsi, penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ardiansyah (2012)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 (Studi empiris pada KPPN Malang)	SDM berpengaruh tetapi tidak signifikan Komunikasi sangat berpengaruh Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual
2	Herlina (2013)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah dalam Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	Informasi, Perilaku dan keterampilan berpengaruh signifikan terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan akuntansi basis akrual.
3	Kusuma (2013)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi tingkat Penerapan Akuntansi Akrual pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang	Tingkat pendidikan staf, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman, latar belakang pendidikan pimpinan, dan ukuran satuan kerja tidak berpengaruh pada tingkat penerapan akuntansi basis akrual
4	Faradillah (2013)	Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan SAP pada PP No. 71 Tahun 2010 (Pemerintah Daerah Kota Makassar)	Kompleksitas laporan keuangan dan budaya organisasi berpengaruh signifikan

Lanjutan tabel 2.4

5	Epiane (2015)	Pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi dan teknologi informasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Pelalawan	SDM tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Pelalawan tetapi, komitmen organisasi dan teknologi informasi berpengaruh
6	Dito Aditia Darma Nasution (2015)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SAP berbasis akrual dengan komitmen SKPD sebagai variable moderating pada pemerintah propinsi Sumatra utara.	pendukung berpengaruh negative terhadap implementasi SAP berbasis akrual .sarana pendukung berpengaruh negative terhadap implentasi SAP berbasis akrual karena kemampuan dan keahlian dibidangnya
7	Dwirandra (2016)	Pengaruh Motivasi sebagai moderasi pengaruh kompetensi SDM dan teknologi informasi pada penerapan akuntansi berbasis akrual	Kompetensi SDM tidak berpengaruh kepada penerapan akuntansi berbasis akrual, sedangkan teknologi informasi berpengaruh positif pada penerapan akuntansi berbasis akrual dipekuat oleh motivasi, tetapi motuvasi tidak memperkuat pengaruh teknologi informasi pada penerapan akuntansi berbasis akrual
8	Elsa Rosiana (2016)	Pengaruh kualitas SDM dan teknologi informasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual PP No. 71 Tahun 2010 (studi kasus pada SKPD-SKPD pemerintah kota Malang)	Kualitas sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansni pemerintah berbasis akrual. Sedangkan teknologi informasi berpengaruh negative terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual

Lanjutan tabel 2.4

9	Raja Rika Anggaraini (2017)	Pengaruh kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi, dan budaya organisasi terhadap implementasi standar akuntansi berbasis akrual	Kualitas sumberdaya manusia, teknologi informasi, dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan akuntansi basis akrual
10	Tri khasanah budi utami (2017)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pelatihan regulasi dan kualitas teknologi informasi terhadap penerapan akuntansi basis akrual(studi kasus pada Dinas Kabupaten Boyolali)	Kompetensi SDM, kualitas teknologi, regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual. Sedangkan pelatihan tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi basis akrual.

Sumber: Hasil review penelitian terdahulu, 2019

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Kualitas sumber daya terhadap implementasi standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam menghadapi pemberlakuan penerapan peraturan yang terkait tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual hal yang terpenting adalah menyiapkan sumber daya manusia. SDM memiliki peranan sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini didukung oleh Krumwiede dalam Kusuma (2013) menunjukkan pelatihan yang memadai memiliki efek positif terhadap kesuksesan adopsi sistem akuntansi. Demikian pula menurut Brusca dalam Kusuma (2013) yang menunjukkan bahwa transisi dari akuntansi berbasis kas menuju basis akrual membutuhkan biaya pelatihan yang signifikan.

Nazier (2009) mengungkapkan tingkat pemahaman dasar staf mengenai administrasi keuangan negara masih sangat rendah. Tingkat pemahaman dasar meliputi lingkup keuangan negara, bentuk pertanggungjawaban keuangan negara, standar akuntansi yang digunakan, dan substansi standar akuntansi pemerintahan. Sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi, disamping pengembangan kapasitas organisasi Insani (2013).

Kusuma (2013) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan staf akuntansi dengan tingkat kepatuhan akuntansi akrual. Temuan empiris dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan Indah (2008), Aldiani (2010), Faradillah (2013), dan Herlina (2013) menunjukkan bahwa SDM memiliki korelasi yang kuat sebagai faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi sistem akuntansi basis akrual. Adapun hipotesis yang diajukan dalam Penelitian ini yaitu:

H₁: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi.

2.6.2 Pengaruh teknologi informasi terhadap implementasi standar akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi

Teknologi informasi yang lebih maju mungkin lebih maju mungkin lebih dapat menerapkan sistem kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah. Penelitian sebelumnya oleh Kusuma (2013) yang memperlihatkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas

teknologi informasi dengan tingkat kepatuhan akuntansi akrual. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aldiani (2010) dan Romilia (2011) bahwa perangkat pendukung mampu menjelaskan keberhasilan penerapan PP No. 24 tahun 2005.

Studi ini menunjukkan bahwa teknologi informasi akan diminta untuk memfasilitasi dan mendukung pengenalan akuntansi akrual di sektor publik. Akibatnya, kualitas tinggi yang ada di dalam sistem informasi organisasi harus dipertimbangkan sebagai prasyarat penting dari keberhasilan pelaksanaan (Ouda, dalam Kusuma, 2013).

Menurut Robbins (2001), sumber penolakan atas perubahan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu penolakan yang dilakukan oleh individual dan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasional. Sikap resistensi yang dilakukan oleh individu adalah: pertama, kebiasaan yaitu pola tingkah laku yang kita tampilkan secara berulang-ulang sepanjang hidup kita. Kita lakukan itu karena kita merasa nyaman dan menyenangkan. Jika perubahan berpengaruh besar terhadap pola kehidupannya, maka muncul mekanisme diri yaitu penolakan. Kedua, rasa aman. Jika kondisi sekarang sudah memberikan rasa aman, dan kita memiliki kebutuhan akan rasa aman relatif tinggi, maka potensi menolak perubahan pun besar. Ketiga, faktor ekonomi. Faktor lain sebagai sumber penolakan atas perubahan adalah soal menurunnya pendapatan. Keempat, yaitu takut akan sesuatu yang tidak diketahui. Sebagian besar perubahan tidak mudah diprediksi hasilnya. Oleh karena itu muncul ketidakpastian dan keragu-raguan. adapun hipotesis yang diajukan dalam Penelitian ini yaitu:

H₂: Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi.

2.6.3 Pengaruh Budaya organisasi terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi

Menurut Robbins (2001), sumber penolakan atas perubahan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu penolakan yang dilakukan oleh individual danyang dilakukan oleh kelompok atau organisasional. Sikap resistensi yang dilakukan oleh individu adalah: pertama, kebiasaan yaitu pola tingkah laku yang kita tampilkan secara berulang-ulang sepanjang hidup kita. Kita lakukan itu karena kita merasa nyaman dan menyenangkan.

Jika perubahan berpengaruh besar terhadap pola kehidupannya, maka muncul mekanisme diri yaitu penolakan. Kedua, rasa aman. Jika kondisi sekarang sudah memberikan rasa aman, dan kita memiliki kebutuhan akan rasa aman relatif tinggi, maka potensi menolak perubahan pun besar. Ketiga, faktor ekonomi. Faktor lain sebagai sumber penolakan atas perubahan adalah soal menurunnya pendapatan. Keempat, yaitu takut akan sesuatu yang tidak diketahui. Sebagian besar perubahan tidak mudah diprediksi hasilnya. Oleh karena itu muncul ketidakpastian dan keragu-raguan.

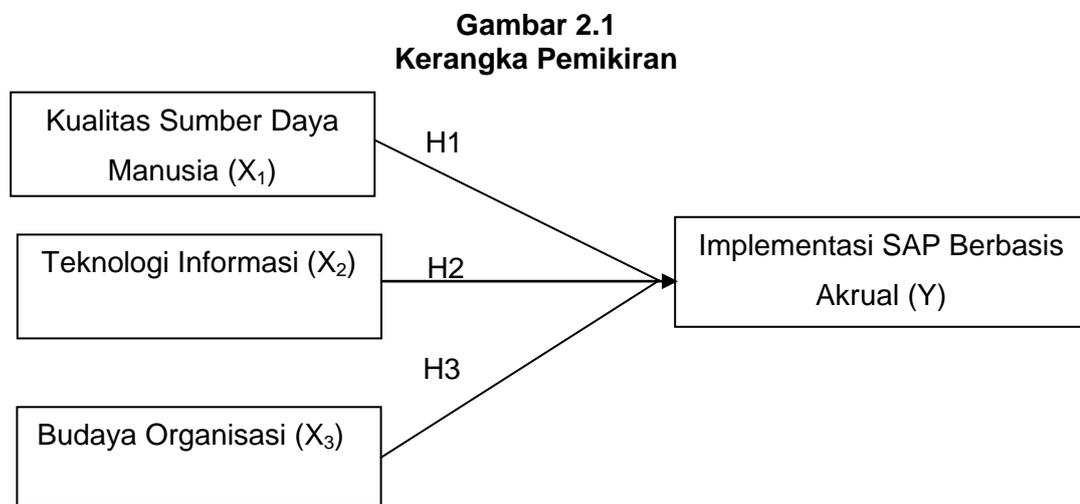
Mengubah budaya bukanlah pekerjaan yang gampang. Dari sudut waktu, perubahan dapat menghabiskan 5 sampai 10 tahun, itupun tingkat keberhasilannya masih dipertanyakan karena respon pegawai terhadap perubahan sangat bervariasi (Sobirin, 2005). Keberhasilan perubahan budaya

salah satunya bergantung pada kuat atau tidaknya budaya yang sekarang ada. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan perubahan budaya adalah kemauan para anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam perubahan. adapun hipotesis yang diajukan dalam Penelitian ini yaitu:

H₃: Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi.

2.6.4 Kerangka Pemikiran

Untuk lebih menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini maka berikut digambarkan kerangka pemikiran yang digunakan.



Variable Independen

Variabel Dependen

Sumber: Utami,2017 Anggaraini, 2017

BAB III METODE PENELITIAN

3.4 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kausal adalah penyelidikan empiris yang sistematis dimana penelien tidak mengandalikan variable bebas secara langsung karena ekstensi dari variable tersebut (Emzir, 21010 : 199). Hubungan kausal adalah hubungan bersifat sebab akibat. Jadi, variabel bebas atau indenpenden (variable yang mempengaruhi) dan (Variabel yang di pengaruhi) adalah Variabel terikat atau dependen (Sugiono, 2014 : 93).

Dalam penelitian ini akan menggambarkan pendekatan Kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian hipotensis-hipotenis dan teori melalui variabel-variabel penelitian dalam rangka (Efrin, 2009 : 47).

3.5 Tempat dan Waktu penelitian

3.5.1 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019. Yaitu beralamatkan di Komplek Perkantoran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Oleh karena itu, Kabupaten Kuantan Singingi menjadi objek penelitian, untuk menilai bagaimana kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi dan budaya organisasi dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk kuesioner penelitian ini direncanakan dibagikan kepada responden, diisi oleh responden dan dikembalikan pada penulis dalam waktu satu bulan.

3.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama bulan januari sampai bulan oktober 2019 dan masih berkelanjutan sampai sekarang.

Tabel 3.2
Waktu Penelitian

Pelaksanaan Kegiatan													
No	Keterangan	Mar s/d Des 2019	2021										
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov
1	Pengambilan Data												
2	Penyusunan Proposal												
3	Seminar Proposal												
4	Pembahasan Akhir												
5	Ujian Akhir												

Sumber: Modifikasi Penulisan, 2021.

3.6 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi (*population*) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sekaran, 2006 : 123). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Bagian keuangan atau akuntansi pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 234 orang adapun rincian populasi penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Daftar Nama Dinas dan Badan yang Terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi dan Populasi yang Dijadikan Sampel

No	Nama Dinas dan Badan	Populasi (orang)
1	Sekretariat daerah	22
2	Sekretariat DPRD	12
3	Inspektorat	5
4	Badan perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan	5
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	5
6	Badan Pendapatan Daerah	10
7	Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	25
8	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	4
9	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	16

Lanjutan tabel 3.3

10	Dinas Kesehatan	15
11	Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang	16
12	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	6
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Dan Desa	6
14	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	6
15	Dinas Lingkungan Hidup	6
16	Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil	8
17	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	6
18	Dinas Pariwisata dan kebudayaan	6
19	Dinas Pertanian	15
20	Dinas Perhubungan	6
21	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persediaan	4
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	4
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4
24	Satuan Polisi Pamong praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6
25	Dinas Tenaga Kerja, Penanam modal dan Pelyan Terpadu	6
26	Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan	10
Jumlah		234

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persediaan, Data diolah, 2019.

3.3.2 Sampel

Sampel (*sample*) adalah sub kelompok atau sebagian dari populasi (Sekaran, 2011 : 123). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, entah karena mereka

adalah satu-satunya memilikinya, atau memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti. (Sekaran, 2011 : 136).

Kriteria responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Responden adalah pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan pada OPD .
2. Responden dalam penelitian ini adalah kepala substansi bagian keuangan dan staf bagian keuangan .

Berdasarkan kriteria diatas, maka tiap OPD yang menjadi responden berdasarkan tugas dan fungsi yang mengelola dan terjun langsung dalam mengelola laporan Keuangan yaitu Kasubag keuangan, bendahara pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu. Sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam Penelitian ini sebanyak 52 orang. Adapun rincian jumlah sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Daftar Nama Dinas dan Badan yang Terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi dan Populasi yang Dijadikan Sampel

No	Nama Dinas dan Badan	Sampel
1	Sekretariat daerah	2
2	Sekretariat DPRD	2
3	Inspektorat	2

Lanjutan tabel 3.4

4	Badan perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan	2
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	2
6	Badan Pendapatan Daerah	2
7	Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	2
8	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	2
9	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	2
10	Dinas Kesehatan	2
11	Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang	2
12	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	2
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Dan Desa	2
14	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	2
15	Dinas Lingkungan Hidup	2
16	Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil	2
17	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	2
18	Dinas Pariwisata dan kebudayaan	2
19	Dinas Pertanian	2
20	Dinas Perhubungan	2
21	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persediaan	2
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	2

Lanjutan tabel 3.4

23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2
24	Satuan Polisi Pamong praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2
25	Dinas Tenaga Kerja, Penanam modal dan Pelayan Terpadu	2
26	Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan	2
Jumlah		52

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persediaan, Data diolah, 2009.

3.8 Jenis dan Sumber Data

3.8.1 Jenis Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal, Umar (2008) menyebutkan desain kausal berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain, dan juga berguna pada penelitian yang bersifat eksperimen dimana variabel independennya diperlakukan secara terkendali oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel dependennya secara langsung.

Peneliti menggunakan desain penelitian ini untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi dan budaya organisasi sebagai variabel independen terhadap implementasi SAP berbasis akrual sebagai variabel dependen pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar kepegawai OPD (Dinas dan Badan) di lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapat penulis dari sumber-sumber seperti internet, koran dan lain-lain (Arikunto,2006 :129)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode survey melalui kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada responden. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab (Sugiono, 2012:137). Data pengujian ini merupakan *cross section* data yaitu tipe studi satu tahap yang data nya beberapa subyek pada waktu tertentu. Data diperoleh dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner dengan dilakukan sendiri oleh peneliti kepada responden, yaitu pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan pada OPD tersebut yaitu kepala substansi bagian keuangan dan bendahara pengeluaran.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner. Instrument penelitian (Sugiono 2014:178) adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomenal alam maupun social yang diamati.

Dengan demikian, penggunaan instrument penelitian yaitu, untuk mencari informasi yang lengkap mengenai masalah, fenomena alam maupun sosial.

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data akurat yaitu dengan menggunakan skala *likert*. (Sugiono 2014:178) skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini jenis instrument berupa angket atau kuesioner tertutup dengan menggunakan skala *likert* 5 tingkat/point yaitu sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. STS :Sangat Tidak Setuju | Diberi skor 1 |
| 2. TS :Tidak Setuju | Diberi skor 2 |
| 3. KS :Kurang Setuju | Diberi skor 3 |
| 4. S :Setuju | Diberi skor 4 |
| 5. SS :Sangat Setuju | Diberi skor 5 |

Sementara kriteria penilaian terhadap penilaian rata_rata indikator dan nilai variable dalam penelitian ini ditentukan dengan skala *likert* yang digunakan(Sudjana,2000:79) yaitu:

1,00-1,80 = Responden memiliki penilaian yang sangat tidak baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.

>1,80-2,60 = Responden memiliki penilaian yang tidak baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.

>2,60-3,40 = Responden memiliki penilaian yang cukup baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.

>3,40-4,20 = Responden memiliki penilaian yang baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.

<4,20-5,00 = Responden memiliki penilaian yang sangat baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.

3.7 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.7.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen.

1. Variabel dependen (Y)

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (*independen*) dan menjadi perhatian utama peneliti. Menurut Sugiyono (2012 : 59) variabel dependen merupakan variabel terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Pemetintah daerah. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 menandakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai kewajiban untuk menerapkan standar akuntansi Pemerintahan (SAP) yang baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hal ini sesuai dengan pasal 32 Undang-undang No.17 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP berbasis akrual.

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen sering disebut sebagai variabel *stimulus*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiono, 2007: 4), adapun yang termasuk variabel independent dalam penelitian ini adalah:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (X₁)

Kualitas Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Kusuma, 2013).

Untuk mengukur Kualitas Sumberdaya Manusia Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua digunakan skala likert 5 poin. Yaitu skala likert 1 sampai 5. Jawaban yang di dapat dibuat skor yaitu nilai 1(STS = Sangat Tidak Setuju), nilai 2 (TS = Tidak Setuju), nilai 3 (KS = Kurang Setuju), nilai 4 (S = Setuju), nilai 5 (SS = Sangat Setuju).

2. Teknologi Informasi (X₂)

Kualitas teknologi informasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tersedianya teknologi informasi yang memadai, terintegrasi dan mudah digunakan. Juga mampu mengolah dan menyediakan data yang akurat dan terkini dalam kaitannya dengan penerapan sistem akuntansi akrua. Sumber

kuesioner teknologi informasi dalam penelitian ini adalah dari penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma, 2013) dan diukur berdasarkan:

1. Platform pelaksanaan kegiatan, pemerintah daerah mempunyai platform pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Jangka Menengah maupun Jangka Pendek dengan transparansi, akuntabilitas, dalam bidang keuangan, membutuhkan dukungan SAP.
2. Sistem mekanisme penyelenggaraan, pemerintah didukung oleh sistem mekanisme penyelenggaraan SAP *clear* dan *clean* dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam bidang keuangan.
3. Sistem manajemen informasi, pemerintah didukung oleh sistem manajemen informasi yang dilaksanakan secara cermat, tepat, akurat, presisi di tingkat pemerintah provinsi sampai kabupaten/kota.
4. Sistem perangkat lunak, pemerintah didukung oleh sistem dalam perangkat lunak SAP yang implementatif khususnya tanpa adanya frekuensi perubahan yang berulang kali.
5. Pelatihan, pemerintah didukung oleh pelatihan peningkatan kualitas pemangku pelaksana sistem perangkat lunak SAP
6. Pendampingan dalam operasional, pemerintah memperoleh pendampingan dalam operasionalisasi pelaksanaan sistem perangkat lunak SAP.

Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan dan mengkomunikasikan informasi.

Untuk mengukur Teknologi Informasi Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua digunakan skala likert 5 poin. Yaitu skala likert 1

sampai 5. Jawaban yang di dapat dibuat skor yaitu nilai 1(STS = Sangat Tidak Setuju), nilai 2 (TS = Tidak Setuju), nilai 3 (KS = Kurang Setuju), nilai 4 (S = Setuju), nilai 5 (SS = Sangat Setuju).

3. Budaya Organisasi (X₃)

Budaya organisasi adalah filosofi dasar organisasi yang memuat keyakinan, norma-norma dan nilai-nilai bersama yang menjadi karakteristik inti tentang bagaimana cara melakukan sesuatu dalam organisasi. Keyakinan, norma-norma dan nilai-nilai tersebut menjadi pegangan semua sumber daya manusia dalam organisasi melaksanakan kinerjanya.

Menurut Robbins (2001), sumber penolakan atas perubahan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu penolakan yang dilakukan oleh individual dan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasional. Sikap resistensi yang dilakukan oleh individu adalah: pertama, kebiasaan yaitu pola tingkah laku yang kita tampilkan secara berulang-ulang sepanjang hidup kita. Kita lakukan itu karena kita merasa nyaman dan menyenangkan.

Jika perubahan berpengaruh besar terhadap pola kehidupannya, maka muncul mekanisme diri yaitu penolakan. Kedua, rasa aman. Jika kondisi sekarang sudah memberikan rasa aman, dan kita memiliki kebutuhan akan rasa aman relatif tinggi, maka potensi menolak perubahan pun besar. Ketiga, faktor ekonomi. Faktor lain sebagai sumber penolakan atas perubahan adalah soal menurunnya pendapatan. Keempat, yaitu takut akan sesuatu yang tidak diketahui. Sebagian besar perubahan tidak mudah diprediksi hasilnya. Oleh karena itu muncul ketidakpastian dan keragu-raguan.

Mengubah budaya bukanlah pekerjaan yang gampang. Dari sudut waktu, perubahan dapat menghabiskan 5 sampai 10 tahun, itupun tingkat

keberhasilannya masih dipertanyakan karena respon pegawai terhadap perubahan sangat bervariasi (Sobirin, 2005). Keberhasilan perubahan budaya salah satunya bergantung pada kuat atau tidaknya budaya yang sekarang ada. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan perubahan budaya adalah kemauan para anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam perubahan.

Untuk mengukur Budaya Organisasi Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua digunakan skala likert 5 poin. Yaitu skala likert 1 sampai 5. Jawaban yang di dapat dibuat skor yaitu nilai 1 (STS = Sangat Tidak Setuju), nilai 2 (TS = Tidak Setuju), nilai 3 (KS = Kurang Setuju), nilai 4 (S = Setuju), nilai 5 (SS = Sangat Setuju).

3.7.2 Definisi Operasional

Defenisi operasional Penerapan SAP berbasis akrua di pemerintah daerah dapat ditinjau dari persepsi dari responden tentang kesiapan mereka dan instansi tempat mereka bekerja dalam menerapkan SAP berbasis akrua, visi dan misi dari instansi dalam melakukan penerapan SAP berbasis akrua dan bagaimana perubahan itu dapat tercapai, serta dukungan yang diberikan oleh instansi.

Tabel 3.5
Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel	Defenisi	Indikator
1	Implementasi SAP berbasis akrual (Y)	Kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual (nunuy , 2016 : 22)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan realisasi anggaran 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih 3. Neraca,Laporan dan arus kas 4. Persepsi dari responden tentang kesiapan mereka dan instansi tempat mereka bekerjadalam menerapkan SAP berbasis akrual, visi dan misi dari instansi dalam melakukan penerapan 5. Pengembangan dan pelatihan kepada pegawai staf (Utami,2017)(Anggrain, 2017)
2	Kualitas Sumber Daya Manusia (X ₁)	SDM adalah kemampuan dari anggota OPD dalam melaksanakan tugasnya. (Hasibuan, 2007 : 10)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman pekerjaan (pengetahuan) sesuai profesi sesuai SAP berbasis akrual 2. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten 3. Sikap(Utami, 2017) (Anggaraini, 2017)

Lanjutan tabel 3.4

3	Teknologi Informasi (X_2)	Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan dan mengkomunikasikan informasi (Wibowo, 2010 : 7)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat keras dan perangkat lunak 2. Kualitas manusia atau pemakai 3. Ketersediaan informasi terhadap teknologi untuk mempermudah jalannya kegiatan. <p>(Utami, 2017) (anggaraini, 2017)</p>
4	Budaya Organisasi (X_3)	Budaya organisasi adalah filosofi dasar organisasi yang memuat keyakinan, norma-norma dan nilai-nilai bersama yang menjadi karakteristik inti tentang bagaimana cara melakukan sesuatu dalam organisasi. (Sugiono, 2006 : 89)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya organisasi yang dapat menerima perubahan 2. Komitmen 3. Kebijakan dalam menerima perubahan 4. Menerima budaya baru <p>(Anggraini, 2017)</p>

Sumber: Definisi Operasional, 2019.

3.8. Metode Analisis Data

3.8.1 Statistik Deskriptif

Metode analisis data menggunakan statistic deskriptif, uji kualitas data dan uji hipotesis. Statistik deskriptif memberi deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), *standar deviasi*, *varians*, *maximum*, *minimum*, *sum*, *range*, *kontosis*, dan *skwesness*. (kemencengan distribusi). (Ghozali, 2013). Penelitian ini hanya menggambarkan rata-rata (mean), standar deviasiasi, maksimum, minimum, dan sum untuk statistik deskriptif.

3.8.2 Uji Kualitas Data

3.8.2.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana validitas data diperoleh dari penyebaran kuisisioner. Uji validitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antar masing-masing pertanyaan ataupun pernyataan dengan skor total pengamatan (Arikunto, 2006 : 202).

Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas pertanyaan/pernyataan kuisisioner adalah Korelasi Product Moment dari Karl Pearson dengan ketentuan: Jika r hitung $>$ r tabel, maka skor butir pertanyaan/pernyataan kuisisioner valid tetapi sebaliknya r hitung $<$ r tabel maka skor butir pernyataan/pertanyaan kuisisioner tidak valid.

3.8.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas dapat dikatakan menunjukkan kekonsistenan dari suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Makin kecil kesalahan 44 pengukuran makin *reliabel* alat pengukur begitu pula sebaliknya. Pengujian keandalan alat pengukuran dalam penelitian ini menggunakan reliabilitas menggunakan metode alpha (α). Metode alpha yang digunakan adalah metode Cronbanch. Menurut Yarnest (2003; 68) instrumen dapat dikatakan handal (*reliabel*) bila memiliki koefisien reliabilitas diatas 0,6. Setelah menilai alpha, selanjutnya membandingkan nilai tersebut dengan angka kritis reliabilitas. Instrumen yang dipakai dalam variabel diketahui handal (*reliabel*) apabila memiliki *Cronbach Alpha* $>$ 0,60 (Ghozali dalam Ririz, 2014).

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogrov-smirnov. Kriteria pengujian satu sampel menggunakan pengujian satu sisi yaitu dengan membandingkan probabilitas dengan tingkat signifikan tertentu, yaitu:

1. Nilai signifikan atau probabilitas $< 0,05$ maka distribusi data adalah tidak normal.
2. Nilai signifikan atau probabilitas $> 0,05$ maka distribusi data adalah normal (Ariani:2013).

3.8.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan atau tidak korelasi diantara variabel independen. Jika terjadi korelasi antar variabel independen maka akan ditemukan adanya masalah multikolinearitas. Suatu model regresi yang baik harus tidak menimbulkan masalah multikolinearitas. Untuk itu diperlukan uji multikolinearitas terhadap setiap variabel bebas yaitu dengan:

1. Melihat angka *Collinearity statistics* yang ditunjukkan oleh *nilai variance inflation factor (VIF)*. Jika $VIF > 5$ maka variabel bebas yang ada memiliki masalah multikolinearitas.
2. Melihat nilai tolerance pada output penilaian multikolinearitas yang baik menunjukkan nilai yang $> 0,1$ akan memberikan kenyataan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas (Erlina:2011).

3.8.3.3 Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari nilai residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas (Priyatno, 2012 : 158). Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplots*, dimana sumbu X adalah sumbu Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*studentized*. Dasar pengambilan keputusan, yaitu:

1. Jika pada pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebur, menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas; dan
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8.4 Uji Autokorelasi

Pengujian terhadap autokorelasi dalam suatu model penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (sekarang) dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelum). Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi.

Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Durbin Watson. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, kriteria DW adalah:

1. Jika $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$ berarti terdapat autokorelasi.
2. Jika DW terletak antara DU dan $4-DU$ berarti tidak terdapat autokorelasi.

3. Jika DW terletak antara DU dan DL atau diantara 4-DU dan 4-DL berarti tidak terdapat autokorelasi.

3.8.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis linear berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen (Prayitno, 2012:127).

Bentuk secara umum persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Implementasi SAP berbasis Akruar

a = konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

X_1 = Kualitas Sumber Daya Manusia

X_2 = Teknologi Informasi

X_3 = Budaya Organisasi

e = Standar error

3.8.5.1 Uji t (Secara Parsial)

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan uji t, yaitu menguji pengaruh parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.

Nilai t tabel dapat dilihat dengan menggunakan tabel t. Dasar pengambilan keputusan adalah :

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

3.8.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel terikat. Adjusted R^2 berarti R^2 sudah disesuaikan dengan derajat masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup dalam perhitungan adjusted (R^2). Nilai koefisien determinasi adalah Nol atau satu. Nilai adjusted R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam variansi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R^2 pada saat mengevaluasi model regresi terbaik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira-kira 400m diatas permukaan laut. Dataran tinggi di daerah ini cenderung berangin dan berbukit dengan kecedrungan 5-300. Dataran tinggi berbukit mencapai ketinggian 400-800 m diatas permukaan laut dan merupakan jajaran bagi bukit barisan. Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah kabupaten kuantan singigi yaitu sungai kuantan dan sungai singigi. Perairan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sebagai sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai kuantan mengalir Sembilan Kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman, Kecamatan, dan Kecamatan Cerenti.

Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu 7.656,03 km², yang berada pada posisi antara 0 00-1 00 lintang selatan dan 101 02-101 55 bujur timur . adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi antara lain:

1. Sebelah utara dengan Kabupaten Kampar Dan Pelalawan
2. Sebelah selatan dengan Propinsi Jambi
3. Sebelah barat dengan Propinsi Sumatra Barat
4. Sebelah timur dengan Kabupaten Indra giri Hulu.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten yang berada di Propinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geokonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas Sumatra dan berada dibagian selatan Propinsi Riau yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan Kuala Enok dengan demikian kabupaten Kuantan Singingi memiliki peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi, perbankan serta pariwisata.

4.1.2 Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu. Wacana otonomi Daerah yang berkembang 1999 telah melahirkan sebuah kabupaten baru sebuah hasil pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu, yakni Kabupaten Kuantan Singingi yang beribukotakan di Teluk Kuantan. Melalui Undang-undang No.53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu resmi menjadi dua bagian yakni Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibu kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu kotanya Teluk Kuantan.

Pada saat kabupaten Kuantan Singingi difenitif yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dengan 151 Pemerintahan Desa atau Kelurahan kecamatan tersebut adalah kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan hilir, Kecamatan Cerenti, dan kecamatan Benai. Sejak dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012, jumlah Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi menjadi 15 Daerah Kecamatan, yaitu Kecamatan Benai, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Inuman, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan

Pangean, Kesamatan Singingi, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya, dan Kecamatan Pucuk Rantau. Bupati Kabupaten Kuantan Singingi mengalami beberapa pergantian yaitu:

1. Drs . H. Rusdji S Abrus Periode Tahun 2000-2001.
2. Drs. H . Asrul Ja'far Periode 2001-2006.
3. H. Sukarmis Periode Tahun 2006-2011.
4. H. Sukarmis Periode Tahun 2011-2016.
5. Drs. H. Mursini, M.Si Tahun 2016-2021.
6. Andi Putra, SH,MH 2021 s/d Sekarang.

4.1.3 Visi Dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yakni Andi Putra,SH, MH dan wakilnya Drs. H.Suhardiman Amby,Ak.,M.M. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki visi dan misi sebagai berikut:

4.1.3.1 Visi Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan nasional dan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian , evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, visi merupakan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir priode perencanaan visi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021-2026 adalah :

“Dengan mewujudkan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang berbudaya, relegius, Maju, berwawasan, sejahtera dan harmonis (Bermawarwah)” Kuansing Bermarawah”.

Adapun makna pernyataan visi Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi diatas adalah sebagai berikut:

1. Unggul adalah peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat, derajat kesehatan, mutu pendidikan, infrastruktur, dan pariwisata.
2. Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat dalam keadaan makmur tidak lagi memikirkan kabutuhan dasar, dalam kehidupan tentram, tertib, dan harmonis.
3. Agamis adalah suasana kehidupan social kemasyarakatan yang rukun dan damai dalam menjalankan agama yang dianutnya.

4.1.3.2 Misi Kabupaten Kuantan Singingi

Sementara misi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan public yang prima.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat cerdas, dan produktif.
3. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup berbasis pertanian dan pariwisata.
4. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruangan yang berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata.
6. Meningkatkan suasana kehidupan dan melestarikan nilai2 budaya.

4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Menurut peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Kabupaten Kuantan Singingi, Tipe A, merupakan unsur staf membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasikan administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan Publik.
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dprd Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- d. Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pendidikan, Bidang Kepemudaan, dan olahraga
 2. Dinas Kesehatan, Tipe A, Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe b, Menyelenggarakan urusan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan

5. Dinas social, Pembedanya masyarakat dan desa, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang social, bidang perdayaan masyarakat dan desa.
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang Pengendalian penduduk Keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
7. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup.
8. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
9. Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan ketahanan pangan.
10. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
11. Dinas Pertanian, tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pertanian.
12. Dinas Perhubungan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perhubungan.
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persendian, tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang komunikasi, informatik, statistik dan persendian.
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian, Tipe B, Menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan perindustrian.

15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe c, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.

16. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja

17. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang kebakaran.

e. Badan Daerah Kabupaten terdiri dari:

1. badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

2. Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

4.2 Deskripsi Data

Data pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel, yaitu OPD Kabupaten Kuantan Singingi. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan kurang lebih empat hari dengan melakukan satu kali pengambilan data, saat pengambialan kuesioner, seluruhnya kembali dan tidak terdapat kuesioner yang cacat ataupun hilang. Pendistribusian kuesioner kepada responden dilakukan dengan cara mendatangi dan membagikan kuesioner secara langsung ke responden. Peneliti akan memberikan waktu sekitar 30 menit kepada masing-masing responden untuk mengisi kuesioner tersebut dan penelitian ini dilakukan selama lebih kurang dua minggu. Tabel 4.1 berikut ini menggambarkan secara ringkas tingkat partisipasi dan pengembalian kuesioner.

Tabel 4.1
Rincian Penyebaran Kuesioner

Kuesioner	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	52	100%
Kuesioner yang kembali	52	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang tidak lengkap	0	0%
Kuesioner yang dapat digunakan	52	100%
N sampel yang kembali = 52 Responden Rate = $(52/100) \times 100\%$ = 100%		

Sumber: Data Olahan, 2021

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 52 responden. Tingkat pengembalian kuesioner sudah mendapat

respon yang cukup baik dari responden dengan mencapai 88 kuesioner kembali atau 100% dari 52 kuesioner yang telah disebar. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat tingkat pengembalian kuesioner % yang berarti sebagian besar responden sangat *cooperative* dengan kuesioner 100% yang dikirimkan. Dari kuesioner yang dikembalikan, terdapat kuesioner yang tidak kembali sebanyak 0 kuesioner. sehingga kuesioner yang dapat digunakan berjumlah 52 kuesioner atau 100%. Dengan demikian maka jumlah sampel akhir dalam penelitian ini adalah sebanyak 52 orang (100%).

4.3 Karakteristik Responden

Objek dalam penelitian ini adalah responden yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria yang menjadi pelaksana pengelolaan keuangan langsung yaitu Kasubag Keuangan, Staf Keuangan, yang ada pada 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing.

4.3.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan pengelompokan responden yang telah dilakukan yang berpartisipasi dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Total	Persentase
Jumlah Sampel	52	100%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	35	79,50%
Perempuan	17	20,50%

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 yakni deskripsi identitas responden Berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari 52 responden, 35 responden adalah pria dengan presentase 79,50% dan 17 responden adalah wanita dengan presentase 20,50%

4.3.2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan pengelompokan responden yang telah dilakukan yang berpartisipasi dalam penelitian ini berdasarkan Umur dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Usia		
< 35 tahun	5	5,70%
>35-50 tahun	35	53,40%
>50 tahun	12	40,90%

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 yakni deskripsi identitas responden Berdasarkan umur dapat diketahui bahwa, responden dalam penelitian ini terdiri dari 5 responden atau 5,70% dengan usia < 35 tahun, 35 responden atau 53,40% dengan usia 35-50 tahun, dan 12 responden atau 40,90% dengan usia lebih dari >50 tahun.

4.3.3 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan pengelompokan responden yang telah dilakukan yang berpartisipasi dalam penelitian ini berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan		
SMA	1	1,10%
S1	30	62,50%
S2	21	36,40%

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 yakni deskripsi identitas responden Berdasarkan pendidikan terakhir dapat diketahui bahwa, responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 responden atau 1,10% dengan pendidikan SMA, 30 responden atau 62,50% dengan pendidikan S1, dan 21 responden atau 36,40% dengan pendidikan S2.

4.3.4 Profil Responden Berdasarkan Masa kerja

Berdasarkan pengelompokan responden yang telah dilakukan yang berpartisipasi dalam penelitian ini berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.5
Karakteristik responden Berdasarkan Masa kerja

Lama Bekerja		
< 10 Tahun	6	11,5%
10 – 20 Tahun	18	34,7%
> 20 tahun	28	53,8%

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 yakni deskripsi identitas responden Berdasarkan masa kerja dapat diketahui bahwa, responden dalam penelitian ini terdiri dari 6 responden atau 11,5% dengan lama bekerja kurang dari 10 tahun, 18 responden

atau 34,7% dengan lama bekerja 10-20 tahun, dan 28 responden atau 53,8% dengan lama bekerja lebih dari 20 tahun.

4.4 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang telah terkumpul yang mencakup perhitungan dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (Sugiyono, 2012:206). Analisis data pada penelitian ini dilakukan pada 52 responden pada 26 OPD Kabupaten Kuansing. Analisa data penelitian ini dilakukan pada 46 item pernyataan yang di nilai oleh responden pada 25 OPD di Kabupaten Kuantan Singingi.

4.4.1 Sumber Daya Manusia (X_1)

Sumber Daya Manusia (X_1) terdiri dari Item 12 item pernyataan item pertama yaitu penempatan pegawai dalam staf keuangan didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi ($X_1. 1$), Item kedua yaitu pegawai yang ditempatkan memahami pekerjaan mengenai SAP berbasis akrual($X_1. 2$), Item ketiga yaitu pegawai staf keuangan yang ada siap untuk melakukan perubahan dalam proses penyusunan laporan keuangan ($X_1. 3$), Item keempat yaitu pegawai staf mengerti dan memahami isi dari PP No.71 Tahun 2010 (SAP berbasis akrual) ($X_1. 4$), Item kelima yaitu OPD memiliki SDM yang mampu dalam laporan keuangan per OPD($X_1. 5$), Item keenam yaitu pegawai staf keuangan telah menguasai baik hardware maupun software yang akan digunakan dalam menerapkan SAP berbasis akrual($X_1. 6$), Item ketujuh yaitu pelatihan menggunakan hardware dan software akan membantu dalam menerapkan SAP berbasis akrual($X_1. 7$), Item kedelapan yaitu saya memahami tugas pokok, fungsi

dan uraian tugas sebagai PA (Pegguna Anggaran) atau PPK (Pejabat Pembuat Keputusan) dengan baik(X_1 , 8), Item kesembilan yaitu saya sering membaca literatur berupa jurnal akuntansi dan buku-buku akuntansi dalam rangka meng-Upgrade pengetahuan dibidang akuntansi(X_1 , 9), Item kesepuluh yaitu saya memahami siklus akuntansi dan mampu menyusun dan menyajikan laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan baik(X_1 , 10), Item kesebelas yaitu saya selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang akuntan(X_1 , 11), item ke tigabelas yaitusaya mendukung penerapan prinsip-prinsip akuntansi dan estimasi yang konservatif(X_1 , 12).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Terhadap Sumber Daya Manusia (X_1)

Item	Tanggapan Responden					TOTAL	Rata-rata item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
X1.1	-	-	3.8%	51.9%	44.2%	100%	4.40	Sangat Baik
X1.2	-	-	-	65.4%	34.6%	100%	4.35	Sangat Baik
X1.3	-	-	-	61.5%	38.5%	100%	4.38	Sangat Baik
X1.4	-	-	-	51.9%	48.1%	100%	4.48	Sangat Baik
X1.5	-	-	-	71.2%	28.8%	100%	4.29	Sangat Baik
X1.6	-	-	3.8%	59.6%	36.5%	100%	4.33	Sangat Baik
X1.7	-	-	1.9%	51.9%	46.2%	100%	4.44	Sangat Baik
X1.8	-	-	-	46.2%	53.8%	100%	4.54	Sangat Baik
X1.9	-	-	-	48.1%	51.9%	100%	4.52	Sangat Baik
X1.10	-	-	3.8%	69.2%	26.9%	100%	4.23	Sangat Baik
X1.11	-	-	-	51.9%	48.1%	100%	4.48	Sangat Baik
X1.12	-	-	-	48.1%	51.9%	100%	4.52	Sangat Baik
Rata-rata variable	4,40							Sangat Baik

Sumber: Data Primer Olahan,2021

Berdasarkan tabel 4.6 diatas untuk item yaitu penempatan pegawai dalam staf keuangan didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi ($X_1.1$), sebagian besar responden setuju yaitu 51,9% dengan rata-rata item sebesar 4,40 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item pegawai yang ditempatkan memahami pekerjaan mengenai SAP berbasis akrual($X_1.2$) sebagian besar responden setuju yaitu 65,4% dengan rata-rata item sebesar 4,35 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Pegawai staf keuangan yang ada siap untuk melakukan perubahan dalam proses penyusunan laporan keuangan ($X_1.3$) sebagian besar responden setuju yaitu 61,5% dengan rata-rata item sebesar 4,38 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Pegawai staf mengerti dan memahami isi dari PP No.71 Tahun 2010 (SAP berbasis akrual) ($X_1.4$) sebagian besar responden setuju yaitu 51.9% dengan rata-rata item sebesar 4,48 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. OPD memiliki SDM yang mampu dalam laporan keuangan per OPD ($X_1.5$) sebagian besar responden setuju yaitu 71,2% dengan rata-rata item sebesar 4,29 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Pegawai staf keuangan telah menguasai baik hardware maupun software yang akan digunakan dalam menerapkan SAP berbasis akrual($X_1.6$) sebagian besar responden setuju yaitu 51% dengan rata-rata item sebesar 4,33 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Pelatihan menggunakan hardware dan software akan membantu dalam menerapkan SAP berbasis akrual ($X_1.7$) sebagian besar responden setuju yaitu 51.9% dengan rata-rata item sebesar 4.44 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Saya memahami tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagai PA

(Pengguna Anggaran) atau PPK (Pejabat Pembuat Keputusan) dengan baik(X_1 . 8) sebagian besar responden sangat setuju yaitu 53.8% dengan rata-rata item sebesar 4,54 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Saya sering membaca literatur berupa jurnal akuntansi dan buku-buku akuntansi dalam rangka meng-Upgrade pengetahuan dibidang akuntansi (X_1 . 9) sebagian besar responden sangat setuju yaitu 51.9% dengan rata-rata item sebesar 4,52 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Saya memahami siklus akuntansi dan mampu menyusun dan menyajikan laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan baik (X_1 . 10) sebagian besar responden setuju yaitu 69.2% dengan rata-rata item sebesar 4,32 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Saya selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang akuntan(X_1 . 11) sebagian besar responden setuju yaitu 51.9% dengan rata-rata item sebesar 3,89 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik.. saya mendukung penerapan prinsip-prinsip akuntansi dan estimasi yang konservatif(X_1 . 12) sebagian besar responden sangat setuju yaitu 51.9% dengan rata-rata item sebesar 4,48 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik.

Berdasarkan seluruh item yang digunakan untuk mengukur variabel sumber daya manusia (X_1) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai tertinggi adalah item(X_1 . 8) 4,54 dengan kriteria penilaian sangat baik dan memiliki penilaian terendah pada item (X_1 . 10) sebesar 4,23. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 4,40. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini bahwa sumber daya manusia pada OPD Kabupate Kuanatan Singingi dalam kategori sangat baik.

4.4.2 Teknologi Informasi (X₂)

Teknologi Informasi (X₂) terdiri dari 11 item pernyataan yaitu Item pertama *Software* yang digunakan mendukung pekerjaan telah tersedia yaitu (X₂. 1), Item kedua yaitu sarana pendukung kegiatan/pekerjaan seperti komputer cukup banyak (X₂. 2), Item ketiga yaitu *software* yang digunakan mendukung pekerjaan telah tersedia (X₂. 3) Item keempat yaitu ketersediaan Komputer dan *software* akan meningkatkan efektivitas kerja. (X₂. 4), Item kelima yaitu sarana Pendukung/ pekerjaan seperti komputer tersebut sudah yang terbaru. (X₂. 5), Item keenam yaitu penggunaan *software* akan membantu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu (X₂. 6), . Item ketujuh yaitu pelatihan yang diberikan membantu pegawai dalam menggunakan hardware dan *software* akuntansi keuangan (X₂. 7), Item kedelapan yaitu subbagian pengelola keuangan memiliki jumlah komputer yang cukup sesuai dengan jumlah pemakai untuk melaksanakan tugas. roses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi(X₂. 8), Item kesembilan yaitu pengolahan data transaksi keuangan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang mendukung pekerjaan (X₂. 9), Item kesepuluh yaitu laporan akuntansi dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi, lebih cepat, mudah dan akurat (X₂. 10), Item kesebelas yaitu pemahaman dan penguasaan terhadap teknologi komputerisasi adalah kemampuan dasar yang dibutuhkan bagi staf pengelola keuangan(X₂.11).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Tanggapan Responen Terhadap Teknologi Informasi(X₂)

Item	Tanggapan Responen					TOTAL	Rata-rata item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
X2.1	-	-	-	75%	25%	100%	4.25	Sangat Baik
X2.2	-	-	-	59.6%	40.4%	100%	4.40	Sangat Baik
X2.3	-	-	-	57.7%	42.3%	100%	4.42	Sangat Baik
X2.4	-	-	9.6%	67.3%	23.1%	100%	4.13	Sangat Baik
X2.5	-	-	-	51.9%	48.1%	100%	4.56	Sangat Baik
X2.6	-	-	-	75%	25%	100%	4.25	Sangat Baik
X2.7	-	-	1.9%	48.1%	50%	100%	4.48	Sangat Baik
X2.8	-	-	7.7%	40.4%	51.9%	100%	4.44	Sangat Baik
X2.9	-	-	5.8%	75%	19.2%	100%	4.13	Sangat Baik
X2.10	-	-	1.9%	46.2%	51.9%	100%	4.50	Sangat Baik
X2.11	-	-		50%	50%	100%	4.50	Sangat Baik
Rata-rata variabel	4,37							Sangat Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 diatas untuk item yaitu *Software* yang digunakan mendukung pekerjaan telah tersedia (X₂. 1), sebagian besar responden setuju yaitu 75% dengan rata-rata item sebesar 4.25 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item sarana pendukung kegiatan/pekerjaan seperti komputer cukup banyak (X₂. 2) sebagian besar responden setuju yaitu 59,6% dengan rata-rata item sebesar 4.40 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item software yang digunakan mendukung pekerjaan telah tersedia (X₂. 3) sebagian besar responden setuju yaitu 57,7% dengan rata-rata item sebesar 4.42 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sanagat baik.. Untuk item

ketersediaan Komputer dan software akan meningkatkan efektivitas kerja ($X_2. 4$) sebagian besar responden setuju yaitu 67.3% dengan rata-rata item sebesar 4.13 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item sarana Pendukung/ pekerjaan seperti komputer tersebut sudah yang terbaru. ($X_2. 5$), sebagian besar responden setuju yaitu 51,9% dengan rata-rata item sebesar 4.56 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item penggunaan software akan membantu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu ($X_2. 6$) sebagian besar responden setuju yaitu 75% dengan rata-rata item sebesar 4.25 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item pelatihan yang diberikan membantu pegawai dalam menggunakan hardware dan software akuntansi keuangan ($X_2. 7$) sebagian besar responden sangat setuju yaitu 50% dengan rata-rata item sebesar 4.48 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item subbagian pengelola keuangan memiliki jumlah komputer yang cukup sesuai dengan jumlah pemakai untuk melaksanakan tugas. roses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi($X_2. 8$) sebagian besar responden sangat setuju yaitu 51,9% dengan rata-rata item sebesar 4.44 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item pengolahan data transaksi keuangan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang mendukung pekerjaan ($X_2. 9$) sebagian besar responden setuju yaitu 75% dengan rata-rata item sebesar 4.13 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Item kesepuluh yaitu laporan akuntansi dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi, lebih cepat, mudah dan akurat ($X_2. 10$) sebagian besar responden sangat setuju yaitu 46,2% dengan rata-rata

item sebesar 4.50 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item pemahaman dan penguasaan terhadap teknologi komputerisasi adalah kemampuan dasar yang dibutuhkan bagi staf pengelola keuangan ($X_{2.11}$). sebagian besar responden setuju dan sangat setuju yaitu 50% dengan rata-rata item sebesar 4.50 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik.

Berdasarkan seluruh item yang digunakan untuk mengukur variabel teknologi informasi (X_2) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai tertinggi adalah item, ($X_{2.5}$) 4,56 dengan kriteria penilaian baik dan memiliki penilaian terendah pada item ($X_{2.4}$) dan ($X_{2.9}$) sebesar 4,13. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 4,37. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini bahwa sumber daya manusia pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori sangat baik.

4.4.3 Variabel Budaya Organisasi (X_3)

Variabel Budaya Organisasi (X_3) terdiri dari 10 item pernyataan, item pertama yaitu dalam menyusun laporan keuangan OPD mempunyai komitmen yang tinggi dalam penyelesaiannya ($X_{3.1}$), item kedua yaitu OPD dapat menerima dengan mudah terhadap perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual (PP No.71 Tahun 2010) ($X_{3.2}$) item ketiga yaitu OPD peduli dengan perubahan yang harus dilakukan ($X_{3.3}$), OPD akan bekerja bersungguh-sungguh walaupun harus belajar untuk memahami peraturan baru ($X_{3.4}$), Bapak/ibu memiliki kesiapan komitmen utama untuk tugas dalam dengan baik hendaknya menjunjung azas, visi dan misi pemakaian SAP berbasis akrual ($X_{3.5}$), bapak/ibu memiliki kesiapan disiplin serta memiliki tanggungjawab dan komitmen terhadap tugasnya untuk melayani dan siap dengan memanfaatkan sistem akuntansi

pemerintahan($X_{3.6}$), bapak/ibu memiliki kesiapan dalam keberanian dalam bersikap, dalam melaksanakan tugas layanan publik dengan peningkatan melalui pendekatan SAP($X_{3.7}$), pemerintah daerah mempunyai/memiliki keinginan dan kemauan untuk mencapai hasil kerja yang baik dengan pembangunan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah($X_{3.8}$) Pemerintah bertanggung jawab moral, terhadap rencana di aplikasikannya SAP dalam menunjang optimasi kinerja pemerintah($X_{3.9}$), Pemerintah mempunyai motivasi untuk mencapai hasil kerja yang baik dengan pembangunan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah ($X_{3.10}$).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Budaya Organisasi (X_3)

Item	Tanggapan Responden					TOTAL	Rata-rata item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
X3.1	-	3.8%	7.7%	40.4%	48.1%	100%	4.33	Sangat Baik
X3.2	-	-	5.8%	53.8%	40.4%	100%	4.35	Sangat Baik
X3.3	-	1.9%	13.5%	55.8 %	28.8%	100%	4.12	Sangat Baik
X3.4	-	-	-	55.8%	44.2%	100%	4.44	Sangat Baik
X3.5	-	-	-	48.1%	51.9%	100%	4.52	Sangat Baik
X3.6	-	-	-	46.2%	53.8%	100%	4.54	Sangat Baik
X3.7	-	-	-	53.8%	46.2%	100%	4.46	Sangat Baik
X3.8	-	-	-	46.2%	53.8%	100%	4.54	Sangat Baik
X3.9	-	-	-	53.8%	46.2%	100%	4.46	Sangat Baik
X3.10	-	-	-	53.8%	46.2%	100%	4.46	Sangat Baik
Rata-rata Variabel				4,42				Sangat Baik

Sumber: Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 diatas untuk item dalam menyusun laporan keuangan OPD mempunyai komitmen yang tinggi dalam penyelesaiannya($X_{3.1}$)

sebagian besar responden sangat setuju yaitu 48,1% dengan rata-rata item sebesar 4,33 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item OPD dapat menerima dengan mudah terhadap perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual (PP No.71 Tahun 2010) ($X_{3,2}$) sebagian besar responden setuju yaitu 53,8% dengan rata-rata item sebesar 4,35 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item OPD peduli dengan perubahan yang harus dilakukan ($X_{3,3}$) sebagian besar responden setuju yaitu 55,8% dengan rata-rata item sebesar 4,12 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item OPD akan bekerja bersungguh-sungguh walaupun harus belajar untuk memahami peraturan baru ($X_{3,4}$) sebagian besar responden setuju yaitu 55,8% dengan rata-rata item sebesar 4,44 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item Bapak/ibu memiliki kesiapan komitmen utama untuk tugas dalam dengan baik hendaknya menjunjung azas, visi dan misi pemakaian SAP berbasis akrual ($X_{3,5}$) sebagian besar responden sangat setuju yaitu 51,9% dengan rata-rata item sebesar 4,52 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Bapak/ibu memiliki kesiapan disiplin serta memiliki tanggungjawab dan komitmen terhadap tugasnya untuk melayani dan siap dengan memanfaatkan sistem akuntansi pemerintahan ($X_{3,6}$) sebagian besar responden sangat setuju yaitu 53,8% dengan rata-rata item sebesar 4,54 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item bapak/ibu memiliki kesiapan dalam keberanian dalam bersikap, dalam melaksanakan tugas layanan publik dengan peningkatan melalui pendekatan SAP ($X_{3,7}$) sebagian besar responden setuju yaitu 53,8% dengan rata-rata item sebesar 4,46 artinya responden dalam

penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item pemerintah daerah mempunyai/memiliki keinginan dan kemauan untuk mencapai hasil kerja yang baik dengan pembangunan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah ($X_3.8$) sebagian besar responden sangat setuju yaitu 53,8% dengan rata-rata item sebesar 4,54 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item Pemerintah bertanggung jawab moral, terhadap rencana di aplikasikannya SAP dalam menunjang optimasi kinerja pemerintah ($X_3.9$) sebagian besar responden setuju yaitu 53,8% dengan rata-rata item sebesar 4,46 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item Pemerintah mempunyai motivasi untuk mencapai hasil kerja yang baik dengan pembangunan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah ($X_3.10$) sebagian besar responden setuju yaitu 53,8% dengan rata-rata item sebesar 4,46 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik.

Berdasarkan seluruh item yang digunakan untuk mengukur variabel budaya organisasi (X_3) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai tertinggi adalah item, ($X_3.6$) ($X_3.6$) 4,54 dengan kriteria penilaian sangat baik dan memiliki penilaian terendah pada item ($X_3.3$) sebesar 4,12. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 4,42. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini bahwa sumber daya manusia pada OPD Kabupaten Kuanatan Singingi dalam kategori sangat baik.

4.4.4 Variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Y)

Variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Y) terdiri dari 13 item pernyataan, item pertama yaitu sosialisasi telah dilakukan dan akan membantu pegawai staf keuangan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 (Y.1), item kedua yaitu pengembangan terhadap teknologi informasi akuntansi sudah maksimal(Y. 2), item ketiga yaitu pelatihan berjenjang kepada pegawai staf keuangan berjalan dengan baik(Y. 3), item ke empat yaitu modul dan Bimtek memberikan informasi dan gambaran yang tepat mengenai SAP berbasis akrua(Y.4), item kelima yaitu laporan Realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah (Y.5), item keenam yaitu laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Y.6), item ketujuh yaitu neraca menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah(Y.7), item ke delapan yaitu Aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi, atau pada saat kejadian tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan akun-akun yang dimaksud dicatat sesuai ketentuan SAP 2010(Y.8), item kesembilan yaitu laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu(Y.9) , item kesepuluh yaitu pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima dan

beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan (Y.10), item ke sebelas yaitu Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Y.11), item ke dua belas yaitu catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas (Y.12), item ke tigabelas yaitu SAP berbasis akrual mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansia (Y.13).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Terhadap Implementasi Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual (Y)

Item	Tanggapan Responden					TOTAL	Rata-rata item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
Y.1	-	-	-	65.4%	34.6%	100%	4.35	Sangat Baik
Y.2	-	-	3.8%	50.0%	46.2%	100%	4.42	Sangat Baik
Y.3	-	-	-	57.7%	42.3%	100%	4.42	Sangat Baik
Y.4	-	-	-	65.5%	34.6%	100%	4.35	Sangat Baik
Y.5	-	-	-	65.4%	34.6%	100%	4.35	Sangat Baik
Y.6	-	-	-	53.8%	46.2%	100%	4.46	Sangat Baik
Y.7	-	-	1.9%	55.8%	42.3%	100%	4.40	Sangat Baik
Y.8	-	-	-	53.8%	46.2%	100%	4.46	Sangat Baik
Y.9	-	-	-	53.8%	46.2%	100%	4.46	Sangat Baik
Y.10	-	-	-	57.7%	42.3%	100%	4.42	Sangat Baik
Y.11	-	-	5.8%	51.9%	42.3%	100%	4.37	Sangat Baik
Y.12	-	-	7.7%	50.0%	42.3%	100%	4.35	Sangat Baik

Y.13	-	-	-	57.7%	42.3%	100%	4.42	Sangat Baik
Rata-rata Variabel	4.40							Sangat Baik

Sumber: Data Olahan Primer,2021

Berdasarkan tabel 4.9 diatas untuk item dalam sosialisasi telah dilakukan dan akan membantu pegawai staf keuangan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 (Y.1) sebagian besar responden setuju yaitu 65,4% dengan rata-rata item sebesar 4,35 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item pengembangan terhadap teknologi informasi akuntansi sudah maksimal(Y. 2) sebagian besar responden setuju yaitu 50% dengan rata-rata item sebesar 4,42 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item pelatihan berjenjang kepada pegawai staf keuangan berjalan dengan baik (Y. 3) sebagian besar responden setuju yaitu 57.7% dengan rata-rata item sebesar 4,42 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item modul dan Bimtek memberikan informasi dan gambaran yang tepat mengenai SAP berbasis akrual(Y.4) sebagian besar responden setuju yaitu 65% dengan rata-rata item sebesar 4,35 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item laporan Realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah (Y.5) sebagian besar responden setuju yaitu 53% dengan rata-rata item sebesar 3,83 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item keenam yaitu laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Y.6) sebagian besar responden setuju yaitu 53,8% dengan rata-rata item sebesar 4,46 artinya responden dalam penelitian ini berada pada

kategori baik. Untuk item neraca menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah(Y.7) sebagian besar responden setuju yaitu 55,8% dengan rata-rata item sebesar 4,40 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi, atau pada saat kejadian tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan akun-akun yang dimaksud dicatat sesuai ketentuan SAP 2010(Y.8). sebagian besar responden setuju yaitu 53,8% dengan rata-rata item sebesar 4,46 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu(Y.9). sebagian besar responden setuju yaitu 50,8% dengan rata-rata item sebesar 4,42 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan (Y.10) sebagian besar responden setuju yaitu 57,7% dengan rata-rata item sebesar 4,42 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya(Y.11) sebagian besar responden setuju yaitu 51,9% dengan rata-rata item sebesar 4,37 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan

naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas (Y.12) sebagian besar responden setuju yaitu 50% dengan rata-rata item sebesar 4.35 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item SAP berbasis akrual mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansia (Y.13) sebagian besar responden setuju yaitu 57,7% dengan rata-rata item sebesar 4.42 artinya responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik.

Berdasarkan seluruh item yang digunakan untuk mengukur Variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Y) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai tertinggi adalah item, (Y.6), (Y.8), (Y.9) 4,46 dengan kriteria penilaian baik dan memiliki penilaian terendah pada item (Y.1) sebesar 4,35. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 4,40 Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini bahwa sumber daya manusia pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori sangat baik.

4.5 Hasil Uji Kualitas Data

4.5.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2009). Pengujian dilakukan dengan metode korelasi *product moment* dari *Pearson* dengan cara melihat angka koefisien korelasi (r_{xy}) yang menyatakan hubungan antara skor butir pertanyaan dengan skor total (*item-total correlation*). Butir dikatakan sah atau valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Untuk menguji butir pertanyaan, maka nilai r_{hitung} diperoleh dengan melihat nilai *Corrected Item-Total Correlation*. Kemudian r tabel (tariff 5 %) dengan persamaan yaitu:

$$r \text{ tabel} = \alpha/2 ; n-k$$

$$r \text{ tabel} = 0,05/2 ; 52-4$$

$$r \text{ tabel} = 0,025 ; 48 = 0,2787$$

Suatu Instrumen penelitian dikatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bila r hitung $>$ r tabel, maka dinyatakan valid
2. Bila r hitung $<$ r tabel, maka dinyatakan tidak valid

1. Sumber Daya Manusia (X_1)

Pada penelitian ini untuk variabel sumber daya manusia (SDM) daerah digunakan 7 item pernyataan. Hasil pengujian validitas data dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Variabel Sumber Daya Manusia

NO	Indikator	Item	R hitung	R table	Kesimpulan
1	Sumber Daya Manusia (X_1)	X _{1.1}	0.438	0.2787	Valid
		X _{1.2}	0.51	0.2787	Valid
		X _{1.3}	0.391	0.2787	Valid
		X _{1.4}	0.744	0.2787	Valid
		X _{1.5}	0.278	0.2787	Valid
		X _{1.6}	0.444	0.2787	Valid
		X _{1.7}	0.476	0.2787	Valid
		X _{1.8}	0.744	0.2787	Valid
		X _{1.9}	0.744	0.2787	Valid

		X _{1.10}	0.783	0.2787	Valid
		X _{1.11}	0.501	0.2787	Valid
		X _{1.12}	0.783	0.2787	Valid
		X _{1.13}	0.783	0.2787	Valid
2	Teknologi Informasi (X ₂)	X2.1	0.267	0.2787	Valid
		X2.2	0.466	0.2787	Valid
		X2.3	0.450	0.2787	Valid
		X2.4	0.544	0.2787	Valid
		X2.5	0.395	0.2787	Valid
		X2.6	0.544	0.2787	Valid
		X2.7	0.804	0.2787	Valid
		X2.8	0.804	0.2787	Valid
		X2.9	0.544	0.2787	Valid
		X2.10	0.804	0.2787	Valid
		X2.11	0.804	0.2787	Valid
3	Budaya Organisasi (X ₃)	X3.1	0.879	0.2787	Valid
		X3.2	0.719	0.2787	Valid
		X3.3	0.607	0.2787	Valid
		X3.4	0.473	0.2787	Valid
		X3.5	0.879	0.2787	Valid
		X3.6	0.879	0.2787	Valid
		X3.7	0.473	0.2787	Valid
		X3.8	0.879	0.2787	Valid
		X3.9	0.473	0.2787	Valid
		X3.10	0.643	0.2787	Valid
4	Implementasi Standar Akuntansi Berbasis	Y.1	0.532	0.2787	Valid

Akrual (Y)	Y.2	0.750	0.2787	Valid
	Y.3	0.456	0.2787	Valid
	Y.4	0.532	0.2787	Valid
	Y.5	0.532	0.2787	Valid
	Y.6	0.434	0.2787	Valid
	Y.7	0.615	0.2787	Valid
	Y.8	0.434	0.2787	Valid
	Y.9	0.434	0.2787	Valid
	Y.10	0.615	0.2787	Valid
	Y.11	0.750	0.2787	Valid
	Y.12	0.750	0.2787	Valid
	Y.13	0.615	0.2787	Valid

Sumber: Data Output SPSS, 2021

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengujian validitas data menunjukkan bahwa nilai r_{hitung} variabel sumber daya manusia, teknologi informasi, budaya organisasi, implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di daerah lebih besar dari nilai r_{tabel} . Dengan demikian indicator dan kuesioner yang digunakan oleh Variabel sumber daya manusia, teknologi informasi, budaya organisasi, implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur Variabel.

4.5.2 Hasil Uji Reabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan uji *cronbach alpha* menggunakan SPSS 17,00. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60 (Ghozali, 2009).

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Sandar Reliabilitas	Cronbach Alpha	Kesimpulan
----------	---------------------	----------------	------------

Sumber Daya Manusia (X1)	0,60	0,802	Reliabel
Teknologi Informasi (X2)	0,60	0,817	Reliabel
Budaya Organisasi(X3)	0,60	0,887	Reliabel
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua (Y)	0,60	0,835	Reliabel

Sumber: Data Olahan, 2021

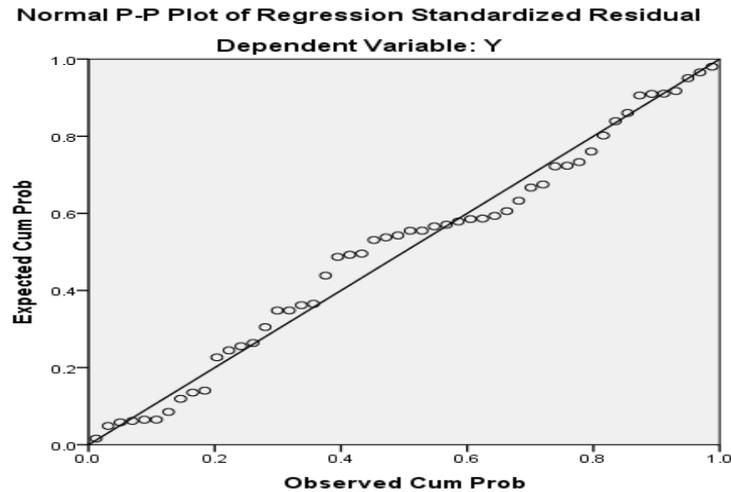
Berdasarkan pada tabel 4.12 menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat di simpulkan indikator atau kuesioner yang digunakan variabel sumber daya manusia, teknologi informasi, budaya organisasi dan implementasi standar akuntansi pemerintah dinyatakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

4.6 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.6.1 Hasil Uji Normalitas

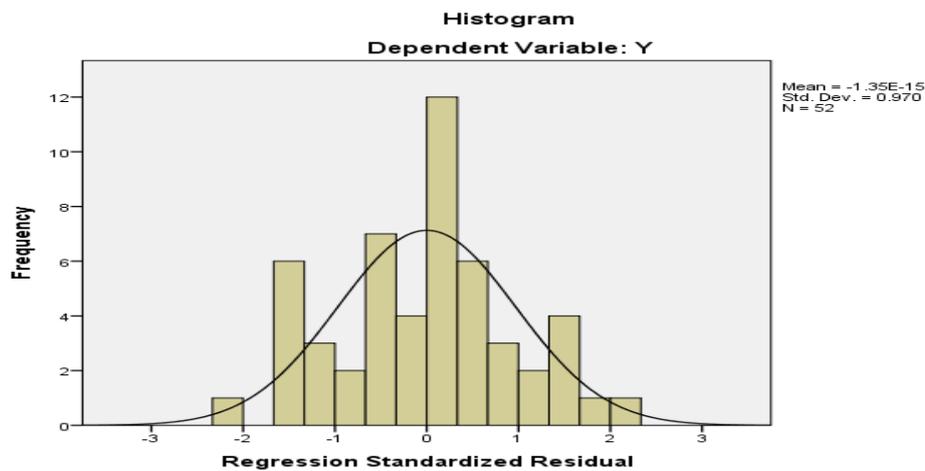
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah jika model regresi memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat grafik normal. Jika pola menunjukkan penyebaran titik-titik di sekitar garis diagonal, dan mengikuti arah garis diagonal mengindikasikan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas dapat dilihat melalui metode grafik histogram dan normal P-plot.

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data Output SPSS, 2021

Gambar 4.2
Grafik Histogram



Sumber: Data Output SPSS, 2021

Berdasarkan tampilan grafik histogram dan normal P-plot dapat disimpulkan bahwa terlihat penyebaran titik-titik di sekitar garis diagonal, dan mengikuti arah garis diagonal. Sedangkan pada grafik histogram terlihat pada grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal. Dengan demikian dapat diartikan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

4.6.2 Hasil Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*) atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Pengujian multikolonieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *inflation factor* (VIF). Adanya multikolonieritas dapat diketahui jika nilai VIF > 10. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.16

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	Keterangan
1 (Constant)			
SDM ((X1)	0.704	1.420	Bebas Multikolinieritas
TI (X2)	0.494	2.026	Bebas Multikolinieritas
BO (X3)	0.427	2.342	Bebas Multikolinieritas

a. Dependent Variable: Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Sumber: Data Output SPSS, 2021

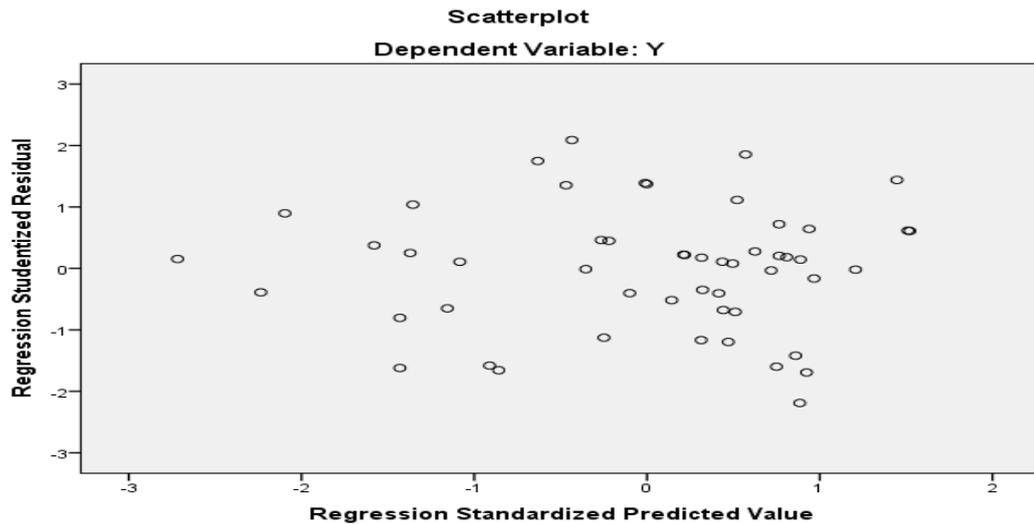
Berdasarkan Tabel 4.13 diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF seluruh variabel < 10 dan tolerance > 0,1. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa tidak terdapat masalah multikolonieritas dalam model regresi.

4.6.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi kesamaan varian dari residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Metode yang digunakan untuk mendeteksi heterokedasitas dapat dilakukan dengan melihat *Scatterplot*. Jika *Scatterplot* membentuk pola tertentu yang jelas maka regresi mengalami gangguan

heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini:

Gambar 4.3
Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber: Data Olahan, 2021



Sumber: Data Output SPSS, 2021

Berdasarkan Gambar 4.3 diatas dapat dilihat *Scatterplot* tidak membentuk pola tertentu (menyebar). Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi. Selain ini uji heterokedastisitas juga dapat menggunakan uji glejser, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedasitas. Uji glejser adalah mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2013:142).

Tabel 4.13 Hasil Uji Glesjer

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	
1				
	(Constant)	2.688	4.550	
	SDM ((X1)	.046	.086	.088
	TI (X2)	.206	.110	.368
	BO (X3)	.170	.103	.349

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Output SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel sumber daya manusia (X_1) $0,088 > 0,05$. Variabel teknologi informasi $0,368 > 0,05$ dan variabel budaya organisasi $0,349 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa pada uji ini menunjukkan tidak adanya heterokedasitas.

4.6.4 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokolerasi dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresilinear berganda ada kolerasi antara kesalahanpengganggu pada priode t dengan kesalahan pada priode t-1 (sebelummnya). Untuk mendeteksi ada tidaknya kolerasi melalui tabel **Durbin Waston**. Dimana secara umum dapat di ambil patokan sebagai berikut (Singgih,2000):

- Jika angka D-W dibawah -2, bearti autokolerasi positif.
- Jika angka D-W diatas +2, bearti autokolerasi negatif.
- Jika angka D-W diantara -2 sampai dengan +2, bearti tidak ada autokolerasi.

Tabel 4.14
Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Durbin-Watson	Keterangan
SDM ((X1)	1.352	Tidak Ada Autokolerasi
TI (X2)		
BO (X3)		

a. Predictors: (Constant), BO, SDM, TI

b. Dependent Variable: Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Sumber: Data Output SPSS, 2021

Pada tabel 4.14 di atas terlihat bahwa nilai Durbin-Watson (DW) pada tabel indenpenden menunjukkan nilai 1,352 dengan berkisar diantara -2 sampai dengan +2, bearti tidak ada autokolerasi pada variabel regresi atau indenpenden.

4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk membuktikan apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka dilakukan uji regresi linier berganda. Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil koefisien regresi dapat dilihat pada tabel 4.15:

Tabel 4.15
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	31.187	7.689	
1 SDM (X ₁)	.164	.145	.174
TI (X ₂)	.309	.186	.304
BO (X ₁)	.049	.173	.055

a. Dependent Variable: Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Sumber: Data Output SPSS, 2021

Berdasarkan hasil analisis regresi diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah :

$$Y = a + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2 + b_3 \cdot X_3 + e$$

$$Y = 31.187 + 0.164 (X_1) + 0.309 (X_2) + 0.049 (X_3)$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai $a = 31.187$ menunjukkan bahwa jika variabel Sumber Daya Manusia (X_1), Teknologi Informasi (X_2) dan Budaya Organisasi (X_3) bernilai 0 (nol) maka nilai Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 31.187.
- b. Nilai koefisien regresi Sumber Daya Manusia (X_1) adalah 0.164 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan satu satuan pada Sumber Daya Manusia (X_1) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka perubahan yang diperoleh pada variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 0.164 satuan dengan arah yang sama.
- c. Nilai koefisien regresi Teknologi Informasi (X_2) adalah 0.309 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan satu satuan pada Teknologi Informasi (X_2) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka perubahan yang diperoleh pada variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 0.309 satuan dengan arah yang sama.
- d. Nilai koefisien regresi Budaya Organisasi (X_3) adalah 0.049 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan satu satuan pada Budaya Organisasi (X_3) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka perubahan yang diperoleh pada variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 0,049 satuan dengan arah yang sama.

4.8 Pengujian Hipotesis

Uji signifikan untuk melihat dan mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variable independen terhadap variable dependen. Untuk mengetahui pengaruh tersebut signifikan atau tidaknyadengan melihat dari besarnya probabilitas value (*p value*) dibandingkan dengan 0,05 (taraf signifikan $\alpha = 5\%$). Hasil uji signifikan t terhadap variabel penelitian menggunakan *software SPSS 20.0 for Windows* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	31.187	7.689		4.056	.000
SDM (X ₁)	.164	.145	.174	2.500	.016
TI (X ₂)	.309	.186	.304	3.251	.002
BO (X ₃)	.049	.173	.055	2.774	.008

a. Dependent Variable: Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Sumber: Data Output SPSS, 2021

a. Hasil Uji Hipotesis 1

Hasil pengujian hipotesis Pertama pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut:

Tabel 4.17
Hasil Pengujian Hipotesis pertama

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	31.187	7.689		4.056	.000
SDM (X ₁)	.164	.145	.174	2.500	.016

a. Dependent Variable: Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Sumber: Data Output SPSS, 2021

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.18 sumber daya manusia (X1). Dapat diketahui bahwa t hitung 2,500 dan p value 0,016. Kemudian t tabel (taraf nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan $n-k ; \alpha/2 = 52-3-1 ; 0.05/2 = 48 ; 0,025 = 2,011$ Dengan demikian diketahui t hitung (2,500) > t tabel (2,011) dan P value 0,016 < 0,05. Maka dapat disimpulkan **H1 diterima**, yang artinya sumber daya manusia (X₁) berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi standar akuntansi berbasis akrual (Y).

b. Hasil Uji hipotesis 2

Hasil pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut:

Tabel 4.18
Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	31.187	7.689		4.056	.000
TI (X ₂)	.309	.186	.304	3.251	.002

a. Dependent Variable: Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Sumber: Data Output SPSS, 2021

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.19 teknologi informasi (X2) dapat diketahui bahwa t hitung 3,251 dan p value 0,002. Kemudian t tabel (taraf nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan $n-k ; \alpha/2 = 52-3-1 ; 0.05/2 = 48 ; 0,025 = 2,011$ Dengan demikian diketahui t hitung (3,251) > t tabel (2,011) dan P value 0,002 < 0,05. Maka dapat disimpulkan **H1 diterima**, yang artinya teknologi informasi (X₂) berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi standar akuntansi berbasis akrual (Y).

c. Hasil Uji hipotesis 3

Hasil pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut:

Tabel 4.19
Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	31.187	7.689		4.056	.000
BO (X ₃)	.309	.186	.304	3.251	.002

a. Dependent Variable: Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar

Sumber: Data Output SPSS, 2021

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.20 budaya organisasi (X₃) dapat diketahui bahwa t hitung 2,774 dan p value 0,006. Kemudian t tabel (taraf nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan $n-k ; \alpha/2 = 52-3-1 ; 0.05/2 = 48 ; 0,025 = 2,011$. Dengan demikian diketahui t hitung (2,774) > t tabel (2,011) dan P value 0,006 < 0,05. Maka dapat disimpulkan **H1 diterima**, yang artinya Budaya organisasi (X₃) berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi standar akuntansi berbasis akruar (Y).

4.9 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R² terletak antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika dalam proses mendapatkan nilai R² yang tinggi adalah baik, tetapi jika nilai R² rendah tidak berarti model regresi jelek (Ghozali, 2009:15). Nilai R² pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.18:

Tabel 4.20
Hasil Analisis Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.453 ^a	.205	.156	3.937

a. Predictors: (Constant), BO X3, SDM X1, TI X2

b. Dependent Variable: ISAPBA

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi pada tabel 4.22 diperoleh R^2 sebesar 0.156. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel Sumber Daya Manusia (X_1), Teknologi Informasi (X_2) dan Budaya Organisasi (X_3) dapat menjelaskan variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah (Y) sebesar 15,6%. Sedangkan sisanya 85,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak teramati dalam model penelitian ini.

4.10 Pembahasan Hasil Penelitian

4.10.1 Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual di Daerah

H_{a1} : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan Hipotesis diatas yaitu Sumber Daya Manusia nilai t_{hitung} sebesar 2,500 dan t_{tabel} sebesar 2,011. Serta P_{value} sebesar $0,016 < 0,05$. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai P_{value} lebih kecil dari nilai alpa 0.05, maka hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan sumber daya manusia terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di daerah. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_{a1}

diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di daerah.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno dalam Putri:2010).

Penempatan pegawai dengan latar belakang akuntansi, pemahaman pekerjaan, penerimaan terhadap perubahan standar, pemahaman standar akuntansi berbasis akrual, ketersediaan SDM yang kompeten dan SDM dapat menguasai baik *hardware* maupun *software* berpengaruh dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Kuansing.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Moh. Mashudi Arif (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara sumber daya manusia terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

4.10.2 Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual di Daerah

H_{a2} : Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan Hipotesis diatas yaitu Teknologi Informasi nilai t_{hitung} sebesar 3,251 dan t_{tabel} sebesar 2,001, . Serta P_{value} sebesar $0,002 < 0,05$. Karena $t_{hitung} >$

t_{tabel} dan nilai P_{value} lebih kecil dari nilai α 0.05, maka hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan Teknologi Informasi terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di daerah. Dengan demikian H_0 ditolak dan **H_a diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di daerah.

Aldiani (2010) dalam Luthfi (2015) Teknologi Informasi merupakan ketersediaan perangkat pendukung berupa tersedianya komputer dan software akan membantu SKPD dalam melaksanakan tugas yang berkaitan informasi yang berkualitas. Perubahan Pengelolaan Keuangan Negara yang lebih akrual dengan kebutuhan dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah.

Ketersediaan perangkat pendukung, tingkat modernitas perangkat pendukung, persepsi pegawai tentang keberadaan perangkat pendukung dalam membantu pekerjaan dan pelatihan menggunakan teknologi informasi yang diberikan juga berpengaruh terhadap penerapan kebijakan yakni standar akuntansi berbasis akrual di pemerintah Kabupaten Kuansing.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Quenseca Epiane (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara teknologi informasi terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

4.10.3 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual di Daerah

H_{a3} : Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan Hipotesis diatas yaitu Budaya organisasi nilai t_{hitung} sebesar 2,774 dan t_{tabel} sebesar 2,011,. Serta P_{value} sebesar $0,006 < 0,05$. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai P_{value} lebih kecil dari nilai alpa 0.05, maka hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan budaya organisasi terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di daerah. Dengan demikian H_0 ditolak dan **H_{a2} diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di daerah.

Budaya organisasi adalah filosofi dasar organisasi yang memuat keyakinan, norma-norma dan nilai-nilai bersama yang menjadi karakteristik inti tentang bagaimana cara melakukan sesuatu dalam organisasi. SKPD mempunyai komitmen yang tinggi dalam penyusunan laporan keuangan, dapat menerima perubahan standar, peduli dengan perubahan dan dapat bekerja bersungguh-sungguh mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Kuansing.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Andi Faradillah (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara budaya organisasi terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penyajian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel sumber daya manusia, teknologi informasi dan budaya terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (studi empiris pada OPD Kabupaten Kuansing). Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar 0,164. Karena sumber daya manusia menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam pengimplementasian SAP berbasis akrual karena SDM merupakan pengendali atas segala komponen yang mendukung berjalannya pengimplementasian tersebut.
2. Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar 0,309 . Karena Ketersediaan perangkat pendukung, tingkat modernitas perangkat pendukung, persepsi pegawai tentang keberadaan perangkat pendukung dalam membantu pekerjaan dan pelatihan menggunakan teknologi informasi yang diberikan juga berpengaruh terhadap penerapan kebijakan yakni standar akuntansi berbasis akrual di pemerintah Kabupaten Kuansing
3. Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar 0,049. Karena Budaya organisasi adalah

filosofi dasar organisasi yang memuat keyakinan, norma-norma dan nilai-nilai bersama yang menjadi karakteristik inti tentang bagaimana cara melakukan sesuatu dalam organisasi. Keyakinan, norma-norma dan nilai-nilai tersebut menjadi pegangan semua sumber daya manusia dalam organisasi melaksanakan kinerjanya. SKPD mempunyai komitmen yang tinggi dalam penyusunan laporan keuangan, dapat menerima perubahan standar, peduli dengan perubahan dan dapat bekerja bersungguh-sungguh mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Kuansing

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan, karena terdapat sejumlah keterbatasan yang peneliti temukan selama melakukan penelitian, diantaranya:

1. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian satuan kerja perangkat daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Kuansing saja kedepannya diharapkan OPD di Kabupaten Kuansing lebih memperhatikan SDM, teknologi informasi, budaya organisasi dalam penerapan SAP berbasis akrual dapat di tingkatkan.
2. Pengumpulan data melalui kuesioner dibutuhkan waktu dan tenaga yang memadai untuk mengirim responden terpilih. Beberapa responden tidak mengembalikan jawaban kuesioner, demikian juga waktu pengembalian yang tidak dapat ditentukan. Hal ini berdampak pada jumlah data penelitian yang dapat diperoleh belum maksimal.

3. Tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian, mengingat kesibukan dari pihak responden. Responden meminta agar kuesioner ditinggalkan, sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan jawaban responden. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan oleh responden belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya.
4. Penelitian selanjutnya agar menambahkan data responden lebih dari 88 dan diperluas ke kabupaten atau kota lainnya ataupun provinsi sehingga memungkinkan hasilnya akan lebih baik.
5. Penelitian selanjutnya perlu ditambahkan metode wawancara langsung pada masing-masing responden dalam upaya mengumpulkan data jika memungkinkan, sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner.
6. Variabel yang diukur bisa diperluas lagi dengan menambah variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di daerah.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdulhak, H.I & Sanjaya, W. 2005. *Media Pendidikan: Suatu Pengantar*. Bandung: Pusat Pelayanan dan Pengembangan Media Pendidikan UPI Bandung
- Arif Bahtiar, Muchlis, Iskandar. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Baldric Siregar dan Bonni Siregar. 2001. *Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Binsar H. Simanjuntak. *Penerapan Akuntansi berbasis Akrua di Sektor Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Kongres XI Ikatan Akuntan Indonesia.
- Afiah ,Nurnunuy. 2010. *Akuntansi Pemerintahan Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Kencana.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Keuangan Daerah edisi Empat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. dan Syam, M. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta Semarang : Badan Penerbit Undip

Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi: Salemba Empat*.

Mahsun et al, 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ke-4. Yogyakarta: BPFE.

Manullang, M. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. 2018. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* Edisi Terbaru. Yogyakarta : Penerbit CV. Andi

Malayu&Hasibuan, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Cetakan ke Sembilan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Robbins, Stephen P. 2000. Pengantar Manajemen dan Organisas

Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta

_____ 2006, *Statistika Untuk Penelitian, Cetakan Ketujuh*. Bandung:. Alfabeta.

Sumarsono, Sonny. 2009. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketanagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wibowo. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: SalembaEmpat

Jurnal dan Hasil Penelitian:

Ardiansyah. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP No.71 Tahun 2010*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya

Nasution, Dito Aditia Darma. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruh limplementasi SAP Berbasis Akrual Dengan Komitmen SKPD Sebagai Variable Moderating Pada Pemerintah Propinsi Sumatra Utara*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Medan.

Dora, Sofia. 2014. *Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*. Skripsi. Medan: Universitas HKBP Nommensen.

- Dwirandra, 2016. *Pengaruh Motivasi sebagai moderasi pengaruh kompetensi SDN dan teknologi informasi pada penerapan akuntansi berbasis akrual*
- Rosiana, Elsa. 2016. *Pengaruh kualitas SDM dan teknologi informasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual PP No. 71 Tahun 2010 (studi kasus pada SKPD-SKPD pemerintah kota Malang*
- Epiane, Quenseca. 2015. *Pengaruh SDM, Komitmen Organisasi dan Teknologi Informasi terhadap Penerapan SAP berbasis akrual di Kabupaten Pelalawan*. Skripsi tidak diterbitkan. Pekanbaru: Program Strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Faradillah, Andi. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan SAP pada PP No.71 Tahun 2010*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanudin.
- Halim, Abdul. 2004. *Reformasi Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Daerah: Dua Pilar Utama Manajemen Keuangan Daerah*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Hariyanto, Agus. 2012. *Penggunaan Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Semarang: STIE Dharma Putra.
- Herlina. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah dalam Implementasi PP No.71 Tahun 2010 pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan*. Skripsi. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Indriasari, Desi. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Ogan Hilir)*. Simposium Nasional Akuntansi XI: Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
- Kusuma, Ririz Setiawati. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi tingkat Penerapan Akuntansi Akrual pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang*

Mashudi, 2014. *Pengaruh Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan SAP Berbasis AkruaI Kabupaten Bondowoso*

Shafrizal. 2015. *Pengaruh SDM, Komitmen Organisasi dan Teknologi Informasi terhadap Kesiapan Pemerintah dalam Penerapan PP 71 Tahun 2010 (Studi pada SKPD Kab. Kampar)*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Riau.

Priyatno, Dwi. 2012. *Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi

Revrison, Baswir. 2007. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPF

Sekaran, Uma. (2011). *Research Methods for business Edisi 1 and 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Dokumen:

BPK RI. 2015. *Pendapat BPK: Kesiapan Pemerintah dalam Pelaporan Keuangan berbasis AkruaI*.

KSAP. 2010. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah*. Makalah disajikan dalam Seminar Pentahapan Implementasi SAP AkruaI Pemerintah Daerah. Jakarta 25 Maret.

KSAP. 2011. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menuju AkruaI basis Dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian*. Makalah disajikan dalam Seminar

Pasal 32 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

Pemerintah menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 Menandakan Bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Telah Mempunyai Landasan Hukum.

PP No. 24 Tahun 2005 dengan PP No. 71 Tahun 2010, Utamanya Terkait Dengan Komponen Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (Basis Kas menuju AkruaI)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Basis AkruaI)

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah

Permendagri 64 Tahun 2013 tersebut semakin memperjelas model akuntansi berbasis akruaI yang akan diterapkan nantinya terutama kalau kita pelajari Lampiran II (Panduan Penyusunan SAPD)

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 menetapkan bahwa pengakuan belanja tersebut dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh pengguna anggaran

Standar Pemerintah (SAP) No. 71 Tahun 2010 dan kebijakan-kebijakan lain di lingkungan pemerintah

UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi.

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : MONIKA KARTIKA DEWI
 NPM : 150412048
 Pembimbing I : DIZKHAMARZAWENY, SE., M.Si
 Pembimbing II : YUL EMRI YULIS, SE., M.Si
 Judul Skripsi : PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI
 INFORMASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP
 IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
 BERBASIS AKRUAL DI PEMERINTAH KABUPATEN
 KUANTAN SINGINGI

No	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	10/7-2019	Perbaiki sesuai buku Randa		
2	29/8-2019	Revisi bab I sesuai saran		
3	07/9-2019	Revisi sesuai saran		
4	04/9-2019	Perbaiki metodologi penelitian		
5	20/9-2019	Uraikan lebih penelitian		
6	02/10-2019	Populasi & Sampel, uraian penelitian		
7	18/10-2019	Acc		
8	19/10-2019	Revisi bab III sesuai 95 & saran		
9	25/10-2019	Acc UTK Seminar Proposal		
10				

Mengetahui
 Ketua Program Studi Akuntansi


 Yul Emri Yulis, SE., M.Si
 NUPN.9910676786

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MONIKA KARTIKA DEWI
 NPM : 150412048
 Pembimbing : DIZKHAMARZAWENY, SE., MM
 Pembimbing : YUL EMRI YULIS, SE., M. Si
 Judul Skripsi : PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1.	8/10 2021	Protokoller penyusunan dan Hasil		Y
2.	13/10 - 2021	Revisi bab IV Hasil Penelitian	Y	
3.	18/10 2021	lanjutan penyusunan		Y
4.	9/11 - 2021	Revisi bab IV sinkronisasi bab III	Y	
5.	11/11 - 2021	Presentasi		Y
6.	18/11. 2021	Finalka bab III	Y	
7.	14/12 - 2021	Revisi bab IV - V sesuai Saran	Y	
8.	6/1 2022	Acc		Y
9.	6/1 - 2022	Acc utk Ujian Skripsi	Y	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



RINA ANDRIANI, SE., M. Si

NIDN.1003058501

BIODATA

I. DATA PRIBADI

Nama : Monika Kartika Dewi
Tempat Lahir : Seberang Pantai
Tanggal Lahir : 17 Maret 1996
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Seberang Pantai
Telepon Rumah Dan HP : 081261856001
Alamat Email : Monikakartikadewi17@gmail.com

**II. Riwayat Pendidikan**

1. Tahun 2008 lulus SD 022 Rantau Sialang
2. Tahun 2011 lulus MTS Muhammadiyah Kuantan Mudik
3. Tahun 2014 lulus SMAN 1 Kuantan Mudik
4. Tahun 2020 lulus S1 Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi

III. Riwayat prestasi

1. Prestasi Akademik
2. Prestasi Non Akademik

Demikian Biodata ini dibuat dengan sebenarnya .

Teluk kuantan , 09 Maret 2022

Monika kartika Dewi
NMP. 150212048